

PROSIDING
SARASEHAN NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PM) KEDUA
PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA
BOGOR, 2 MARET 1991



IPB20010791



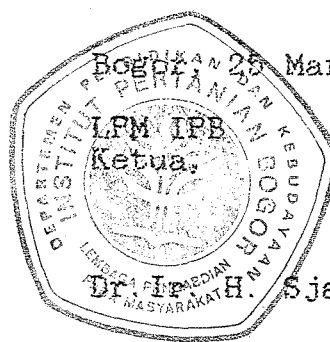
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berdasarkan maksud dan tujuannya, Sarasehan Nasional Pengabdian pada Masyarakat (kedua) yang telah dihadiri 39 Kelembagaan Pengabdian pada Masyarakat dari 22 Perguruan Tinggi Negeri, 12 dari Perguruan Tinggi Swasta, dan lima dari Kopertis, telah berhasil mendiskusikan dan merumuskan struktur keorganisasian, mekanisme kerja, dan program-program pengabdian pada masyarakat dalam memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua.

Rumusan hasil sarasehan yang termuat dalam laporan ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dalam penyusunan Statuta Perguruan Tinggi maupun penyusunan petunjuk operasional pelaksanaan FPM oleh Perguruan Tinggi.

Kepada berbagai pihak yang telah ikut mendukung pelaksanaan Sarasehan ini diucapkan terimakasih banyak.



Bogor, 25 Maret 1991

Dr. Ir. H. Sjafri Mangkuprawira

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN TOPIK-TOPIK SARASEHAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Topik-Topik Sarasehan	2
II. PERUMUSAN HASIL SARASEHAN	
2.1. Kondisi Faktual	3
2.2. Struktur Organisasi.....	5
2.3. Mekanisme Kerja	6
2.4. Program Pengabdian pada Masyarakat.....	8
2.5. Khusus.....	12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Beberapa Alternatif Bentuk Struktur Organisasi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat	13
1.1. Usulan Universitas Lambung Mangkurat.....	13
1.2. Usulan IKIP Bandung	14
1.3. Usulan Universitas Pajajaran	15
1.4. Usulan Universitas Hassanuddin	16
1.5. Usulan Univ. Diponegoro	17
2. Daftar Nama Peserta	18
3. Jadwal Acara.....	20
4. Sambutan Rektor IFB.....	21
5. Topik-Topik Makalah	23

I. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN TOPIK-TOPIK SARASEHAN

1.1. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah pula dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 khususnya yang menyangkut sistem Perguruan Tinggi.

Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) Institut Pertanian Bogor yang memprakarsai Sarasehan Komunikasi Pengabdian pada Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia yang I pada 6 Februari 1990 tahun yang lalu dimana pada waktu itu telah dihasilkan masukan penting tentang status kelembagaan LPM, pada tahun 1991 ini telah pula memprakarsai Sarasehan Komunikasi PPM PT se Indonesia yang ke II.

Sarasehan yang ke II lebih mengkhususkan pembahasan pada:

1) Bagaimana bentuk struktur keorganisasian PPM, 2) Bagaimana mekanisme kerja di dalam kelembagaan PPM dan dengan unit-unit dari dalam PT dan, 3) Program-program apa saja yang dianggap relevan untuk periode pembangunan jangka panjang tahap kedua.

1.2. Tujuan

Tujuan Sarasehan Komunikasi PPM yang ke dua adalah untuk merumuskan:

- 1.2.1. Bentuk struktur keorganisasian PPM yang dianggap layak yang disesuaikan dengan peranti lunak, peranti keras dengan program Perguruan Tinggi itu sendiri, khususnya bagi PT yang selama ini kelembagaan PPM-nya masih berstatus Pusat dan Balai.
- 1.2.2. Mekanisme kerja di dalam kelembagaan PPM dan dengan unit-unit lain dalam PT termasuk-pengesaan kegiatan PPM untuk nilai KUM dosen.
- 1.2.3. Program-program PPM baik program jangka pendek maupun jangka panjang yang dianggap relevan terutama untuk memasuki masa pembangunan jangka panjang tahap kedua.

1.3. Topik-Topik

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka dalam sarasehan ini terdapat dua topik yang dibahas, yaitu:

- 1) Struktur organisasi dan mekanisme kerja kelembagaan pengabdian pada masyarakat, masing-masing oleh:
 1. Dr.H. Djudju Sudjana, M.Ed. (Ketua LPM IKIP Bandung)
 2. Drs. Yonihanto Wasimun, MS. (Kepala Pusat PPM Universitas Lambung Mangkurat)

2) Program-program pengabdian pada masyarakat dalam memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua, masing-masing oleh:

1. Prof. Dr. Bahrein T. Sugihen (Kepala Pusat PPM UNSYIAH Banda Aceh)
2. Ir. Nisyamburi (Ketua LPM Univ. Diponegoro)
3. Prof. Dr. Wahyu Karhiwikarta (Ketua LPM UNPAD Bandung)

II. PERUMUSAN HASIL SARASEHAN

2.1 KONDISI FAKTUAL

1. Kondisi peranti keras dan lunak untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (PM) di seluruh perguruan tinggi relatif masih dalam keadaan beragam baik ditinjau dari aspek fasilitas, tenaga ahli, kelembagaan, maupun sumberdaya dana.
2. Struktur organisasi Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) yang beragam terkait dengan jenis dan volume kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan masing-masing perguruan tinggi.
3. Komunikasi dan koordinasi program pengabdian kepada masyarakat antara LPM dan unit-unit organisasi di suatu perguruan tinggi belum sepenuhnya maksimal. Kondisi itu dicerminkan oleh masih adanya :
 - a. Kelembagaan PM yang belum berfungsi sepenuhnya sebagai pengendali dan penilai kegiatan PM unit lain;
 - b. Kebijakan pelaksanaan PM dengan satu pintu yang belum terwujud dengan efektif;
 - c. Sistem pelaporan kegiatan PM yang belum lancar dan belum terpusat.
4. Sistem pemberian insentif bagi staf pengajar dan pengurus kelembagaan PM belum mendorong mereka untuk memaksimalkan kegiatannya dalam darma PM. Kondisi itu dicerminkan oleh:
 - a. masih kompleksnya aspek-aspek yang dinilai dalam menetapkan penghargaan untuk KUM

II. PERUMUSAN HASIL SARASEHAN

2.1 KONDISI FAKTUAL

1. Kondisi peranti keras dan lunak untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (PM) di seluruh perguruan tinggi relatif masih dalam keadaan beragam baik ditinjau dari aspek fasilitas, tenaga ahli, kelembagaan, maupun sumberdaya dana.
2. Struktur organisasi Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) yang beragam terkait dengan jenis dan volume kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan masing-masing perguruan tinggi.
3. Komunikasi dan koordinasi program pengabdian kepada masyarakat antara LPM dan unit-unit organisasi di suatu perguruan tinggi belum sepenuhnya maksimal. Kondisi itu dicerminkan oleh masih adanya :
 - a. Kelembagaan PM yang belum berfungsi sepenuhnya sebagai pengendali dan penilai kegiatan PM unit lain;
 - b. Kebijaksanaan pelaksanaan PM dengan satu pintu yang belum terwujud dengan efektif;
 - c. Sistem pelaporan kegiatan PM yang belum lancar dan belum terpusat.
4. Sistem pemberian insentif bagi staf pengajar dan pengurus kelembagaan PM belum mendorong mereka untuk memaksimumkan kegiatannya dalam darma PM. Kondisi itu dicerminkan oleh:
 - a. masih kompleksnya aspek-aspek yang dinilai dalam menetapkan penghargaan untuk KUM

- b. masih rendahnya angka kredit KUM untuk kegiatan PM dari staf pengajar (tidak merangsang)
 - c. dana dan sumber dana yang masih terbatas
5. Koordinasi program PM yang masih lemah bukan saja terjadi di antara unit-unit yang ada di dalam perguruan tinggi tetapi juga terjadi dengan perguruan tinggi dan lembaga -lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut.
 6. Belum semua perguruan tinggi telah merumuskan mekanisme kerja dan agenda program PM dalam bentuk tertulis yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan perkembangan-perkembangan yang baru.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

1. Dalam menyusun struktur organisasi LPM perlu diperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut:
 - a. ketentuan-ketentuan yang berlaku: Undang-Undang No. 2 1989, PP No. 30 tahun 1990 dan statuta masing-masing perguruan tinggi.
 - b. asas fungsional yaitu bagaimana LPM sebagai koordinator PM harus mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan fungsi perguruan tinggi dalam darma PM.
 - c. asas manajerial yaitu bagaimana LPM harus mampu menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian secara efektif dan efisien.
2. Struktur organisasi seyogianya mencerminkan fungsi-fungsi dari setiap subsistem yang terkait pada perumusan kebijaksa-

naan dan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan. Selain itu hendaknya menggambarkan mekanisme kerja antarunit organisasi di perguruan tinggi yang ada secara terkoordinasi dengan baik.

3. Dalam merumuskan struktur Organisasi kelembagaan PM perlu diperhatikan aspek-aspek fleksibilitas, keterbukaan dan otonomi perguruan tinggi.
4. Struktur organisasi di bawah ketua LPM mempunyai fungsi dan tugas yang setara dengan pusat-pusat yang ada di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Sebutan-sebutan struktur tersebut dapat berupa : Ketua/Kepala Kelompok Program, Ketua/Kepala Bidang, Ketua/Kepala Kelompok Pengabdian, Ketua/Kepala Satuan Tugas, dan Ketua/Kepala Unit Program. Ketua/Kepala yang dibantu seorang Sekretaris itu diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada ketua LPM.
5. Komisi Pertimbangan dapat dibentuk sesuai dengan keperluan dan kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan
6. Struktur Ketua dan Sekretaris LPM berada dalam satu kotak untuk menghindari salah pengertian dari fungsi sekretaris.
7. Untuk terwujudnya keterpaduan diantara pelaku program tri darma maka Ketua LPM "harus" menjadi anggota Senat Perguruan Tinggi.

2.3. MEKANISME KERJA

1. Seperti halnya dalam menyusun Struktur Organisasi LPM maka dalam mekanisme kerja PM perlu memperhatikan aspek-aspek fleksibilitas, keterbukaan dan otonomi perguruan tinggi.

2. Mekanisme kerja program PM harus dilihat dari tiga sisi/jalur :
 - a. Jalur koordinasi di dalam struktur perguruan tinggi
 - b. Jalur LPM sebagai unsur pelaksana PM.
 - c. Jalur LPM sebagai koordinator program PM antara LPM dengan Fakultas, Pusat Penelitian, Jurusan dan Laboratorium.
3. Mekanisme kerja program PM dalam suatu perguruan tinggi seyogianya diterapkan dengan kebijaksanaan satu pintu tanpa harus menimbulkan arus birokrasi yang tidak efisien.
4. Sesuai dengan kedudukannya seperti tercantum dalam PP Nomor 30 tahun 1980 maka fungsi LPM dalam penerapan mekanisme kerja adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pengembangan program pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi.
 - b. mengkoordinasi penyelenggaraan program PM yang dilaksanakan oleh fakultas, pusat penelitian, unit SATGAS, jurusan, laboratorium dan tenaga akademik baik kelompok maupun perorangan.
 - c. melakukan kerjasama atas nama pimpinan perguruan tinggi bersangkutan mengenai program PM dengan perguruan tinggi lain dan badan-badan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama dengan unit-unit lain dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - e. menyelenggarakan seminar dan penyebarluasan hasil-hasil pengabdian pada masyarakat.
5. Agar mekanisme kerja kelembagaan PM dapat berjalan baik maka diperlukan adanya pedoman pokok, uraian kerja dan agenda pengabdian kepada masyarakat pada tiap perguruan tinggi.
 6. Untuk menggairahkan dan memberi penghargaan yang layak kepada tenaga akademik dalam melaksanakan kegiatan PM, maka besarnya KUM yang sekarang 0 - 15 %, sebaiknya diubah menjadi minimal 10 - 15 %.
 7. Untuk meningkatkan program PM maka hendaknya LPM mampu dan aktif mencari sumber-sumber dana inkonvensional dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Catatan: Beberapa alternatif bentuk struktur organisasi LPM disajikan pada Lampiran 1.

2.4. PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Strategi Dasar

1. *Konsolidasi*

Konsolidasi organisasi dimaksudkan sebagai usaha penguatan sendi-sendi dan mekanisme organisasi seperti pedoman pokok pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, personalia, administrasi, tatakerja dan anggaran agar mencapai hasil dan dayaguna yang optimal. Untuk itu konsolidasi dapat dilakukan

ke dalam dan ke luar secara berkesinambungan dan berencana.

2. *Integrasi*

Integrasi dimaksudkan sebagai suatu usaha yang bertujuan agar semua unsur Unit organisasi dapat mengetahui dan menghayati tujuan, arah dan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, sejak awal semua unit pengabdian kepada masyarakat sudah harus diserasikan dalam melihat pandangan kedepan, menelaah tujuan dan sasaran pengabdian kepada masyarakat serta mengolah kemampuan sumber potensi yang ada. Selain itu tiap program pengabdian kepada masyarakat haruslah terintegrasi dengan program kelompok sasaran pengabdian kepada masyarakat, program pembangunan nasional dan juga dengan dharma pendidikan dan penelitian. Karena itulah upaya memasyarakatkan dharma pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi tidaklah semata-mata dilakukan LPM tetapi juga dilakukan oleh fakultas, pusat penelitian dan jurusan serta laboratorium. Selain itu proses diseminasi hasil penelitian perlu terus ditingkatkan bagi keperluan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi oleh unit-unit.

3. *Pengembangan*

Bobot rencana dasar program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat semestinya lebih berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran serta pengembangannya disamping tugas-tugas rutin. Untuk itu produk-produk penelitian yang dilakukan perguruan tinggi dan instansi lain perlu dimanfaatkan

seoptimal mungkin dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Dipandang dari dimensi siklus waktu dan masalah, LPM dan unit-unit lainnya secara mantap terus-menerus harus mencari dan memasyarakatkan gagasan atau konsep pembangunan kepada berbagai kelompok sasaran. Jadi LPM tidak pasif menunggu permintaan.

B. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan

1. Sebagai suatu kesatuan proses dalam pelaksanaan tri dharma, maka LPM dapat mengadakan penelitian (kaji tindak) yang hasil penelitiannya dipakai sebagai dasar dalam merumuskan masalah, menentukan halayak sasaran pengabdian kepada masyarakat dan merumuskan strategi program PM. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh LPM tidaklah berhenti hanya untuk penelitian saja tetapi seharusnya terkait atau berkelanjutan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Di dalam menyusun Program PM harus diperhatikan faktor-faktor internal dan external.
 - a. Faktor internal lebih menitikberatkan pada pengaturan institusi masing-masing Perguruan Tinggi, termasuk kemampuan dalam penyediaan sumberdaya manusia dan dana.
 - b. Faktor external tiada lain adalah faktor faktor-faktor yang berkembang di masyarakat dalam aspek-aspek ipoleksosbud.
3. Sebaiknya program PM itu memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) harus melihat kecenderungan-kecenderungan di masa depan; (2) diarahkan pada masalah-masalah strategis

masyarakat dan pembangunan; (3) diarahkan pada dampak yang nyata dan meluas dan (4) menunjang keberhasilan program pembangunan nasional.

4. Di dalam menyusun program PM perlu diperhatikan faktor-faktor fleksibilitas, keterbukaan dan otonomi perguruan tinggi.
5. Untuk tercapainya pelaksanaan program PM di perguruan tinggi diperlukan suatu program payung dengan koordinasi LPM.
6. Khalayak sasaran program PM tidak dibatasi pada masyarakat pedesaan saja tetapi juga masyarakat di perkotaan.
7. Program-program PM khususnya yang menyangkut upaya pengkajian dan pengembangan hendaknya berorientasi waktu yang cukup panjang (multi years), dan terencana dengan baik. Untuk itu dibutuhkan dana cukup besar antara lain dari Depdikbud c.q Ditbinlitabmas seperti yang terjadi pada Lembaga Penelitian serta dari pihak-pihak swasta.

C. Jenis Program

Antara lain:

- a. Pengembangan sumberdaya manusia (pendidikan, pelatihan ketrampilan).
- b. Pengembangan, penerapan dan penyebarluasan teknologi tepatguna.
- c. Pengembangan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
- d. Program pengembangan wilayah khususnya di wilayah lahan kering dan transmigrasi serta wilayah terisolasi.
- e. Penyebarluasan informasi hasil PM pada masyarakat.

- f. Pelayanan profesional pada masyarakat.
- g. Pengembangan ekonomi desa khususnya Koperasi Unit Desa
- h. Pengembangan kesadaran politik, budaya dan hukum
- i. Pengembangan program Pasca KKN
- j. Pengembangan masyarakat di daerah kumuh perkotaan
- k. Perencanaan pembangunan wilayah.

2.5. K H U S U S

Atas usul IPB maka telah disepakati secara bulat bahwa:

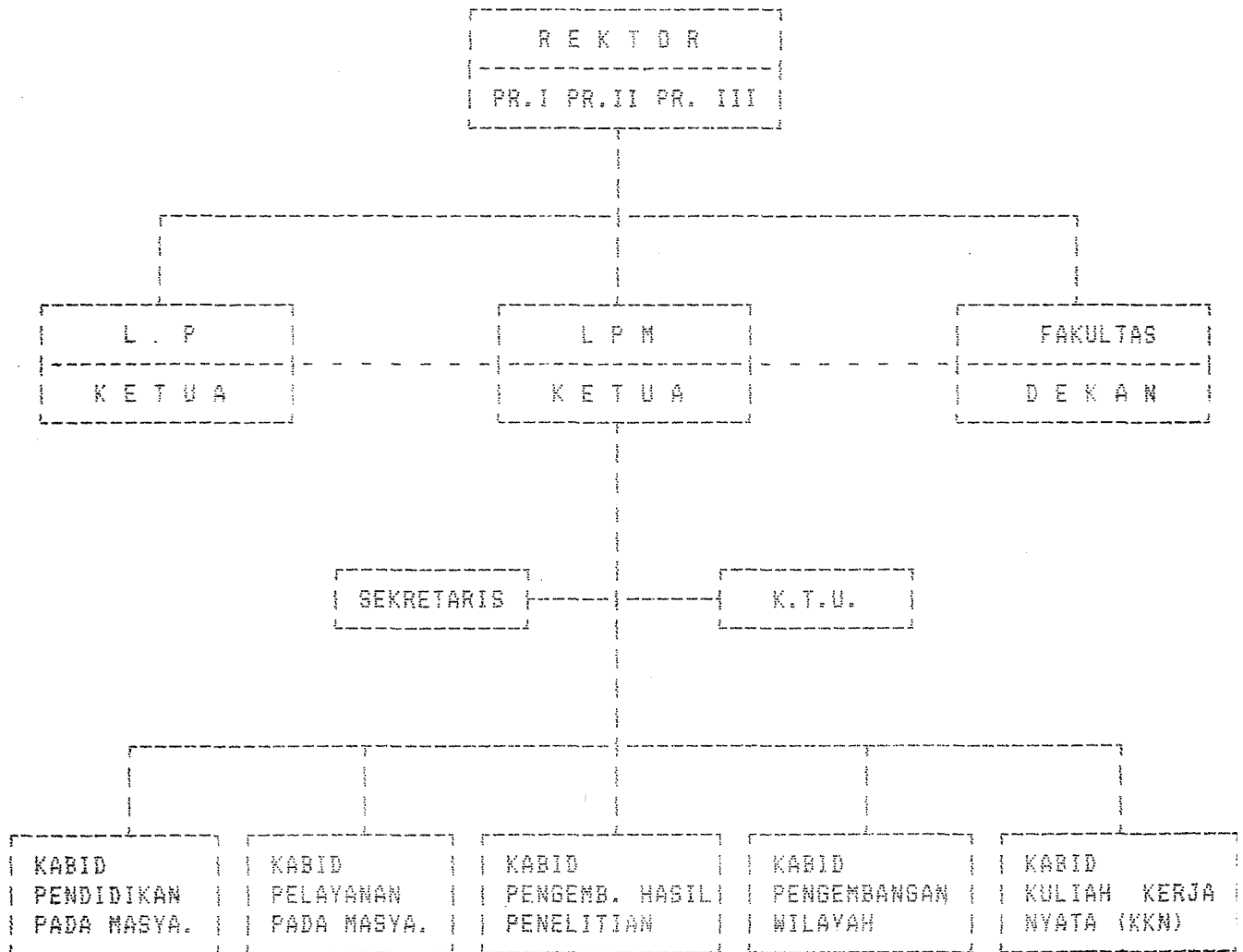
1. Sarasehan Nasional PM yang berikutnya dilaksanakan secara bergilir di antara perguruan tinggi.
2. Sarasehan Nasional PM yang ketiga akan diadakan di UNDIP Semarang pada tahun 1982.

Perumus:

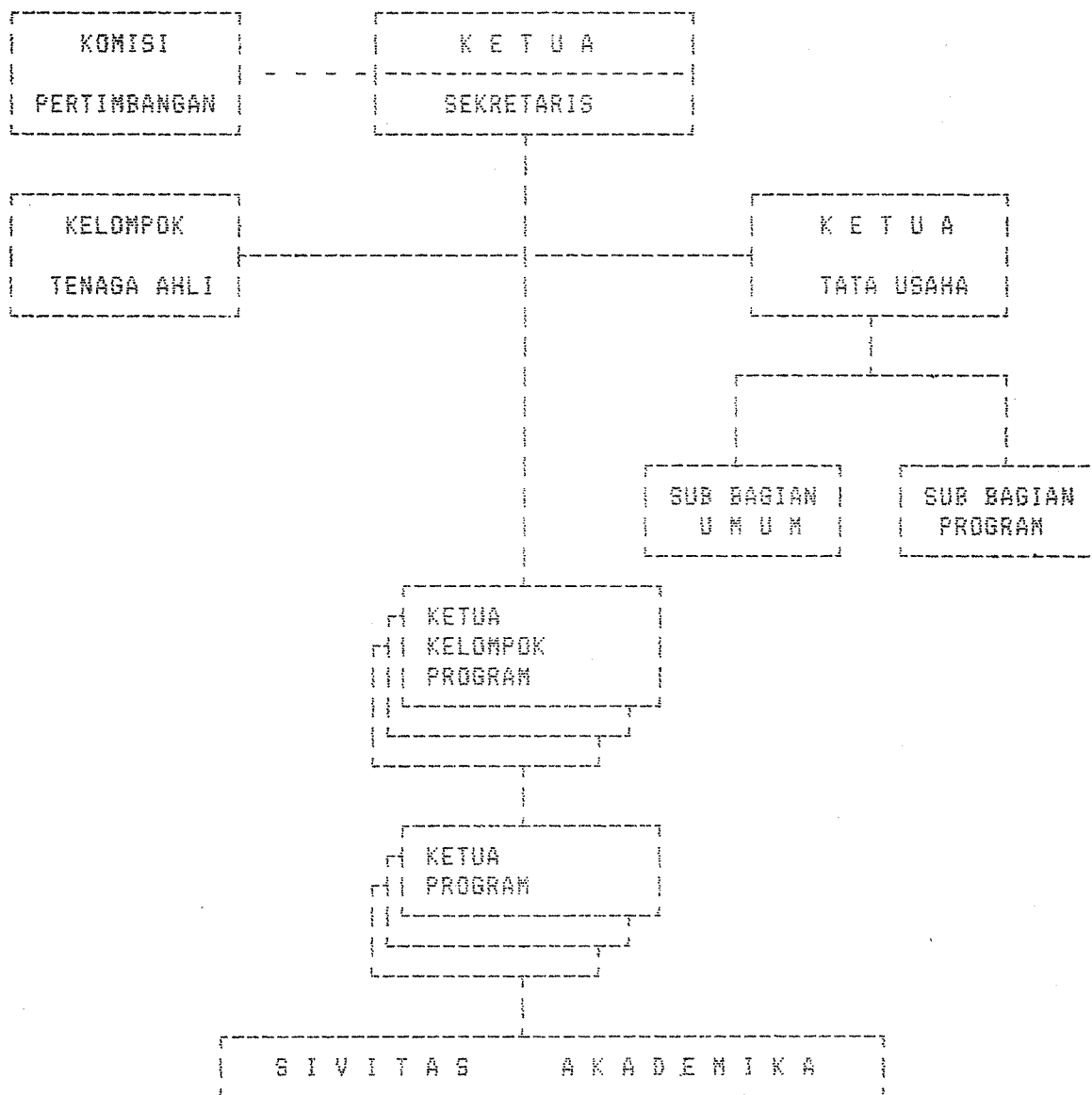
Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira (IPB)	Ketua
Drh. A. Gani Siregar, MS. (IPB)	Sekretaris
Prof. Dr. Ir. Sofyan Asnawi (UNAND)	Anggota
Prof. Dr. Bahrein T. Sugihen (UNSVIAH)	Anggota
Prof. Dr. Wahyu Karhiwikarta (UNPAD)	Anggota
Dr. Djudju Sudjana, M.Ed. (JKIP BDG)	Anggota
Ir. Nisyahuri (UNDIP)	Anggota
Drs. Jonihanto Wasimun, MS. (UNLAM)	Anggota

Lampiran 1. BEBERAPA ALTERNATIF BENTUK STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1.1. Usulan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin



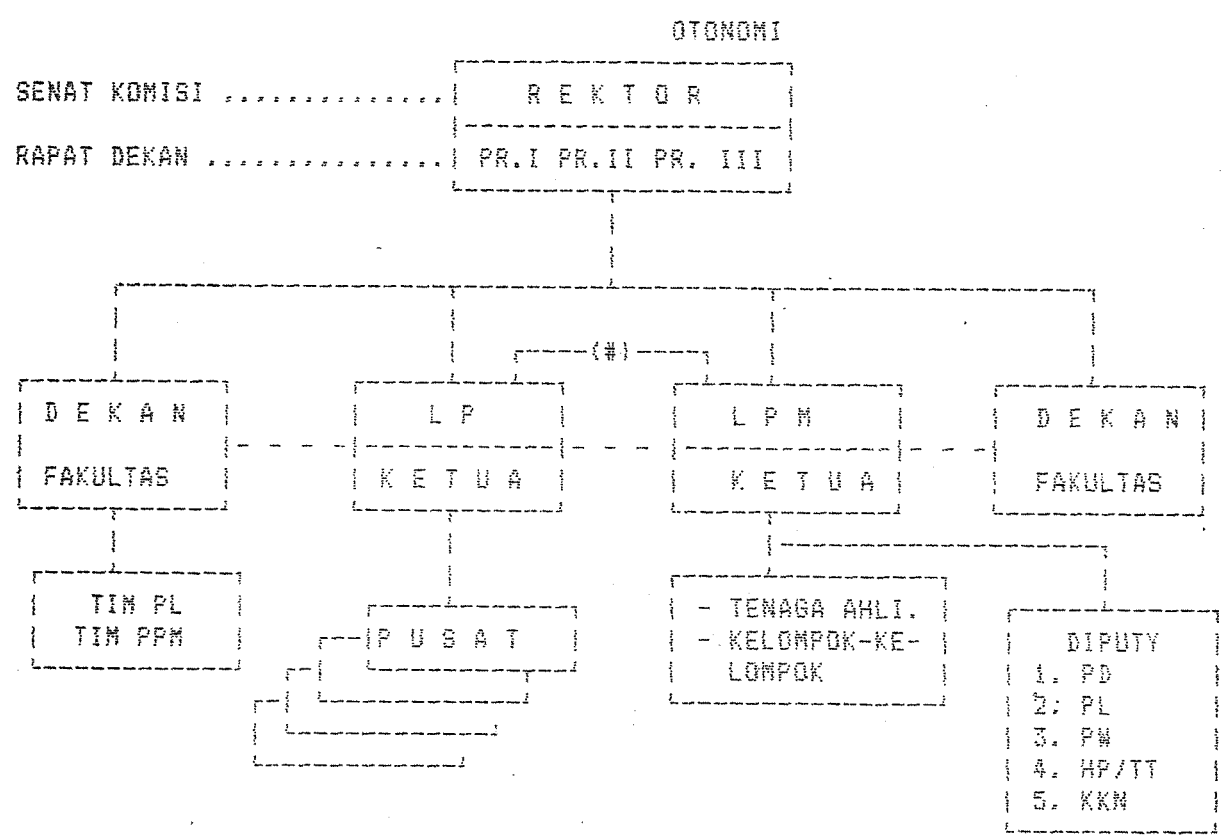
1.2. Usulan IKIP Bandung



----- Garis Konsultasi

----- Garis Fungsional

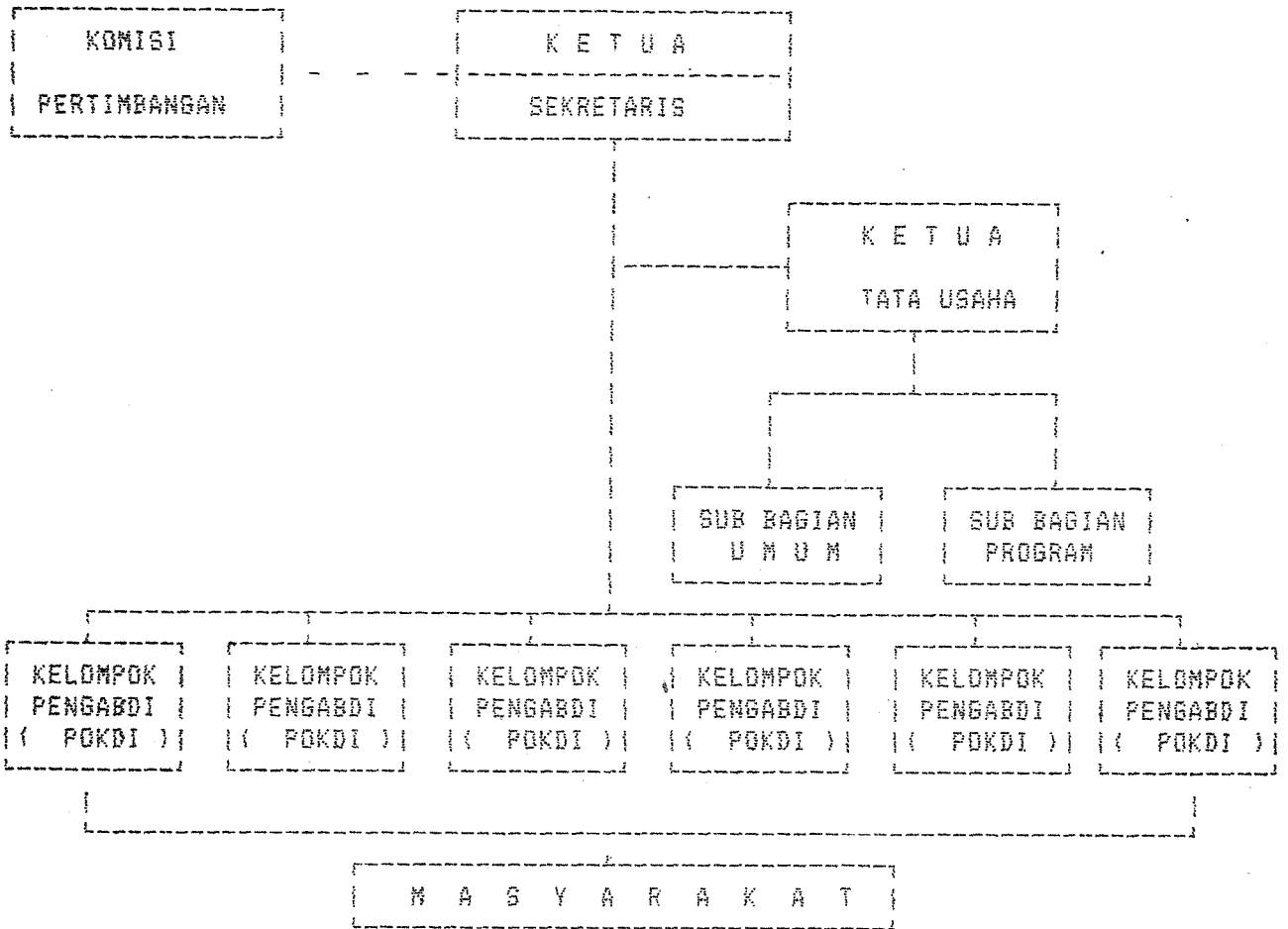
1.3. Usulan Universitas Pajajaran Bandung



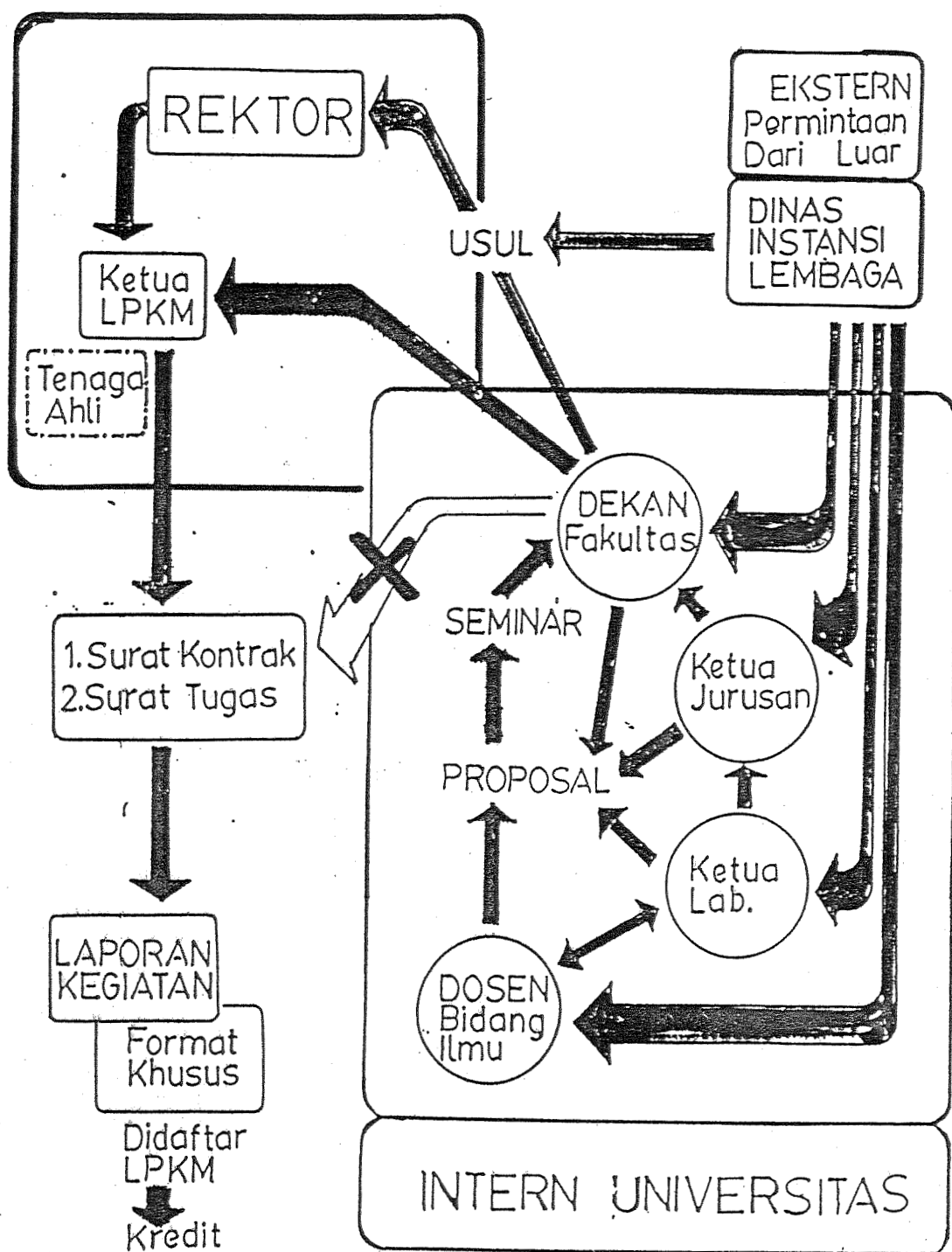
Datatan : (#) Dapat dibentuk Komisi Pertimbangan pada tingkat institut yang memberikan masukan pada LP/LPM.

- DIPUTY : PD = Pendidikan; PL = Pelayanan ;
 PW = Pengembangan Wilayah
 HP/TT= Hasil Penelitian/Teknologi Tepatguna
 KKN = Kuliah Kerja Nyata

1.4. Usulan Universitas Hasanuddin



1.5. Usulan Universitas Diponegoro



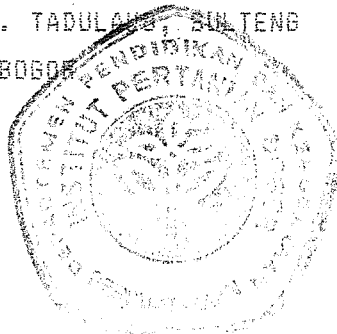
Keterangan:

- alur usulan proposal intern universitas
- ⇒ alur permintaan dari luar

Lampiran 2.

DAFTAR NAMA PESERTA
SARASEHAN NASIONAL PPM II PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA
TANGGAL 2 MARET 1991

NO.	N A M A	ALAMAT/TELEPON	KETERANGAN
1.	PROF.DR.IR. SOFYAN ASNAWI	UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG	KETUA PPM 4
2.	PIET MONIAGA, SH	UNIV. SAMRATULANGI, MANADO	KETUA PPM
3.	PROF.DR. BAHREIN T.SUGIHEN	UNIV. SYAH KUALA, BANDA ACEH	KETUA PPM
4.	DR.H.DJUDJU SUDJANA, M.Ed	IKIP BANDUNG	KETUA LPM
5.	DRS. MAS'UD. HMN	IKIP MUHAMADIYAH JAKARTA	SEKRETARIS LPM
6.	DRS M. HABIB MUSTOPO	IKIP MALANG	KETUA LPM
7.	DR.IR. KAHAR MUSTARI	UNIV. HASANUDIN, UJUNG PANDANG	SEKRETARIS LPM
8.	IR. NISYAMHURI	UNIV. DIPONEGORO, SEMARANG	KETUA LPM
9.	EDDY TOEGIYONO, AS.SH.SU	UNIV. TANJUNGPURA, PONTIANAK	KEPALA LPM
10.	DRS. JONIHANTO WASIMUN, MS	UNIV. LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN,	KEPALA PPM
11.	DRS. TUMBO SARANANI	UNIV. HALUOLEO, KENDARI	KA. BALAI PPM
12.	DRS. ASEP CHAHYANTO	UNIV. SILIWANGI	SEKRETARIS LPM
13.	BAGUS KETUT LODJI	KOPERTIS WILAYAH VIII DENPASAR TIMUR	SEKR. KOPERTIS
14.	DR. MUCHIDIN APANDI, MSc	UNIV. BANDUNG RAYA	-
15.	DR. DJUHARI	KOPERTIS WILAYAH VI SEMARANG	SEKRETARIS
16.	DRS. YAHYA SENAMAT, BST, MED	UNIV. FAKUAN	KETUA LPM
17.	IR.DRS.EKO EDY SUSANTO	ITN, MALANG	DOSEN ITN
18.	DR. J. TURANG	IKIP MANADO	KEPALA PPM
19.	DRS. J. RATAG	IKIP MANADD	SEKRETARIS PPM
20.	DR.IR. SAAD NASUHIN	UNIV. SRWIJAYA	KEPALA PPM
21.	DRS. EDY SUNARYO	ISI YOGYAKARTA	KA. BALAI PPM
22.	DR. MUS HULISELAN	UNPATI, AMBON	KAPUS PPM
23.	DRS. H. NURDIN RACHMAN	UNIV. TADULANG, SUNTENG	KA. BALAI PPM
24.	DR. IR. H. SJAFRI MANGKUPRAWIRA	IPB BOGOR	KETUA LPM



NO.	N A M A	ALAMAT/TELEPON	KETERANGAN
25.	DRS. SUNANDAR	STP TANJUNGBARI	KA. BALAI PPM
26.	DRS.YUDI AMIYUDIN, MS	KOPERTI WILAYAH IV BANDUNG	KABAG. BIMB. KOPERTIS
27.	DRS. UDIS KURNIADI	KOPERTIS WILAYAH IV BANDUNG	SUBAG. PENELI- TIAN DAN PPM
28.	DRS. SUBIYAKTO ATMSIS- WOYO, MPA	UNIVERSITAS INDONESIA	SEKRETARIS LPM
29.	AFWAN NAJIB, SE.	STIEB BANDUNG	-
30.	DR. SADIQ A. KUNTORO, MEd.	IKIP JOGJAKARTA	KAPUS PPM
31.	DR.IR. HARIJONO, MApp.Sc	UNIV. BRAWIJAYA	KETUA LPM
32.	DRS. W.J. SUPARDI	UNIV. HANG TUAH SURABAYA	PD I FIA
33.	DRS.WAWAN S.SETIAWAN	UNIV.KRISNADWIPAYANA,BEKASI	-
34.	IR. SULUH KUMORO	ITENAS BANDUNG	-
35.	PROF.DR.WAHYU KARHIWIKARTA	UNPAD BANDUNG	KETUA LPM
36.	IR. I KETUT RIKA	UNIV. UDAYANA	KAPUS PPM
37.	DRS. SUDIJANTA	KOPERTIS WIL. V YOGYAKARTA	
38.	DR. SUNARSO	UNIV. SEBELAS MARET SURAKARTA	KEPALA PPM
39.	DRS.H. HERY AZHAR AZIS, MS	STIE JAKARTA	
40.	PROF.DR.IR. KUNTJORO	LPM IPB	KAPUS PWD
41.	DR.IR. SURDIDING R.,M.SC	LPM IPB	KAPUS P2KKN
42.	DRH. ABDULGANI A.S.,MS	LPM IPB	KAPUS P3M

Lampiran 3.

JADWAL ACARA
SARASEHAN NASIONAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM) II
DI AULA LPM IPB BOGOR, 2 MARET 1991

No.	W a k t u	A c a r a
1.	08.00 - 09.00	Pendaftaran Peserta
2.	09.00 - 09.45	Pembukaan - Sambutan Ketua LPM - Sambutan Rektor IPB dilanjutkan dengan pembukaan Sarasehan secara resmi
3.	09.45 - 10.00	Ramah tamah
4.	10.00 - 12.00	Penyajian makalah dan Diskusi I: <i>Paper I : Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Kelembagaan PPM</i> <i>Penyaji : 1. Dr.H. Djudju Sudjana, M.Ed. (Ketua LPM IKIP Bandung)</i> <i>2. Drs. Yonihanto Wasimun, Ms. (Kapus PPM UNLAM)</i> <i>Moderator: Dr.Ir.H. Sjafri Mangkuprawira</i>
5.	12.00 - 13.00	Istirahat/Makan Siang
6.	13.00 - 15.00	Penyajian makalah dan Diskusi II: <i>Paper II : Program-program Pengabdian pada Masyarakat dalam Kemazuki Jangka Panjang Tahap Kedua</i> <i>Penyaji : 1. Prof. Dr. Bahren T. Sugihan (Kapus PPM UNSYAH)</i> <i>2. Ir. Nisyamburi (Ketua LPM UNDIP)</i> <i>3. Prof. Dr. Wahyu Karhiwikarta (Ketua LPM Univ. Pajajaran)</i> <i>Moderator: 1. Prof. Dr. Ir. Sofyan Asnawi</i>
7.	15.00 - 15.30	Istirahat / Perumusan
8.	15.30 - 16.00	Pembacaan Hasil Perumusan dan Penutupan oleh Tim Perumus/Panitia

Lampiran 4.

**SAMBUTAN REKTOR IPB
PADA SARASEHAN NASIONAL PPM KEDUA, PT SE INDONESIA
BOGOR, 2 MARET 1991**

Ass. wr. wbr.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME bahwa hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara Serasehan yang penting ini. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan selamat datang di Kampus IPB Baranangsiang ini kepada Saudara sekalian, semoga kehadiran sehari di Bogor ini bermanfaat.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 baru saja diundangkan dimana kelembagaan PPM masih tetap diakui. Tentunya itu perlu kita syukuri karena kita ketahui bahwa telah banyak suara-suara yang agak bernada sumbang tentang perlu tidaknya kelembagaan PPM ini sewaktu konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi (cikal bakal PP 30/1990) digodok. Dan Alhamdulillah, berkat usaha kita bersama, khususnya juga karena adanya hasil serasehan yang kita laksanakan pada tahun yang lalu maka kelembagaan dan program Pengabdian Pada Masyarakat tetap diakui.

Saudara-saudara sekalian,

Setelah satu tahapan kita lalui yakni mempertahankan keberadaan kelembagaan PPM maka sekarang kita melangkah lagi untuk membenahi diri dan merencanakan apa yang akan kita lakukan. Untuk itu saya sangat menghargai prakarsa Ketua LPM IPB untuk mengadakan Sarasehan PPM yang kedua ini, di mana akan dibahas dua persoalan penting yaitu :

- 1). Struktur keorganisasian PPM yang dianggap layak bagi Perguruan Tinggi dan
- 2). Mekanisme kerja dan program PPM yang relevan untuk jangka panjang pembangunan tahap ke dua.

Kedua topik ini saya nilai sangat tepat karena disamping membahas segi-segi pengelolaan kelembagaan juga diharapkan dapat dirumuskan arah program PPM di masa yang akan datang.

Untuk itu perlu diingat agar di dalam kita membuat program-program PPM tersebut diperlukan kejelian kita bersama melihat program apa yang memiliki nilai strategis di masa yang akan datang. Dasawarsa mendatang adalah era teknologi informasi. Disamping itu transformasi struktural dalam pembangunan dengan segala tantangannya juga akan terjadi. Karena itu kedudukan PPM saya nilai sangat penting yang diharapkan sebagai perangkat utama Perguruan Tinggi mampu untuk menyebarluaskan dan

menerapkan semua informasi dan teknologi yang perlu untuk masyarakat.

Semua harapan-harapan itu kiranya dapat kita rumuskan pada pertemuan hari ini. Namun demikian mengingat kondisi tiap Perguruan Tinggi di Indonesia relatif masih beragam maka tentunya perumusan struktur organisasi, mekanisme kerja dan program kerja haruslah dilakukan secara realistis dan tidak ambisius.

Akhirnya saya ucapkan selamat berdiskusi, semoga yang kita lakukan hari ini merupakan sumbangan nyata yang dapat kita berikan dalam pembangunan Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Dengan mengucapkan Bismillahirohmannirrohim, Serasehan Nasional Pengabdian pada Masyarakat Perguruan Tinggi se-Indonesia yang Kedua ini secara resmi dibuka. Semoga Tuhan YME selalu memberikan rahmatNYA kepada kita, Amin.

Sekian dan terima kasih.
Assalamua'laikum Wr.Wb.

Rektor

Prof.Dr.Ir.H. SITANALA ARSYAD

.Lampiran 5

TOPIK—TOPIK MAKALAH

**STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA
KELEMBAGAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

&

**PROGRAM—PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DALAM MEMASUKI JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN TAHAP II**

STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KELEMBAGAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT *)

Oleh : Djudju Sudjana **)

A. Rasional

Penyusunan dan/atau pemantapan organisasi dan mekanisme kelembagaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas alasan-alasan di bawah ini.

1. Alasan Yuridis

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi :

- a. Pasal 35 menyatakan bahwa organisasi universitas/institut terdiri atas unsur pelaksana akademik: Fakultas, Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pasal 43 menjelaskan dalam ayat :
 - (1) Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas, Pusat Penelitian, Jurusan, Laboratorium, kelompok dosen dan perorangan;
 - (2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan;
 - (3) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli dan Tenaga administrasi;
 - (4) Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada pimpinan Universitas/Institut yang bersangkutan.

3. Alasan Fungsional

Adanya organisasi dan mekanisme lembaga pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan fungsi perguruan tinggi dalam dharma pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yaitu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian langsung kepada masyarakat, secara melembaga, melalui metodologi ilmiah, sebagai tanggung jawab luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional

*) Disampaikan pada Sarasehan PPM ke-2 di LPM Institut Pertanian Bogor tanggal 2 Maret 1991

**) Ketua LPM IKIP Bandung

4. Alasan Manajerial

Organisasi adalah produk dari fungsi manajemen, yaitu pengorganisasian, untuk menjamin kelancaran penjabaran kebijaksanaan, tugas-tugas, dan program lembaga pengabdian kepada masyarakat. Pengorganisasian merupakan kegiatan memadukan sumber-sumber, terutama sumber manusiawi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hersey dan Blanchard, 1982). Dengan demikian organisasi adalah gabungan orang-orang yang bekerjasama berdasarkan pembagian tugas, peraturan dan sarana untuk mencapai tujuan.

Organisasi diperlukan karena manusia mempunyai keterbatasan baik mental maupun fisik (Schemerhorn dkk, 1985). Karena organisasi sangat tergantung kepada penampilan orang-orang yang tergabung di dalamnya maka organisasi disebut sistem sosial. Organisasi dapat pula disebut sistem terbuka karena di dalamnya terdapat transformasi sumber-sumber manusiawi dan non-manusiawi, sebagai masukan dari lingkungannya (environmental inputs), yang kemudian didayagunakan dalam kegiatan (process) untuk mencapai tujuan (outputs) yang bermanfaat bagi lingkungannya.

Secara garis besar, struktur organisasi terdiri atas dua tipe, yaitu tipe organik (perilaku) dan tipe mekanistik (klasik). Tipe organik menitik beratkan pada koordinasi tugas-tugas dan adanya loyalitas orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tipe ini mempunyai ciri keterbukaan, berorientasi pada pemecahan masalah, cepat menyesuaikan dengan dan mengantisipasi keadaan, bercorak kemasyarakatan, relatif luwes, dan memungkinkan adanya interaksi informal. Sedangkan tipe mekanistik lebih menitikberatkan pada instruksi dan keketatan disiplin. Ciri-ciri tipe ini adalah tertutup, program terpusat, rutin, statis, berorientasi teknis, dan hubungan formal yang ketat. Walaupun kedua tipe organisasi itu memiliki kelemahan masing-masing, faktor-faktor kelebihan keduanya dapat diterapkan dalam setiap struktur organisasi sehingga dapat saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dari berbagai struktur organisasi seperti struktur organisasi lini, lini dan staf, fungsional, proyek, atau kepanitiaan (Flipppo, 1975; Siagian, 1982), maka struktur organisasi lini dan staf dianggap lebih cocok untuk lembaga pengabdian pada masyarakat.

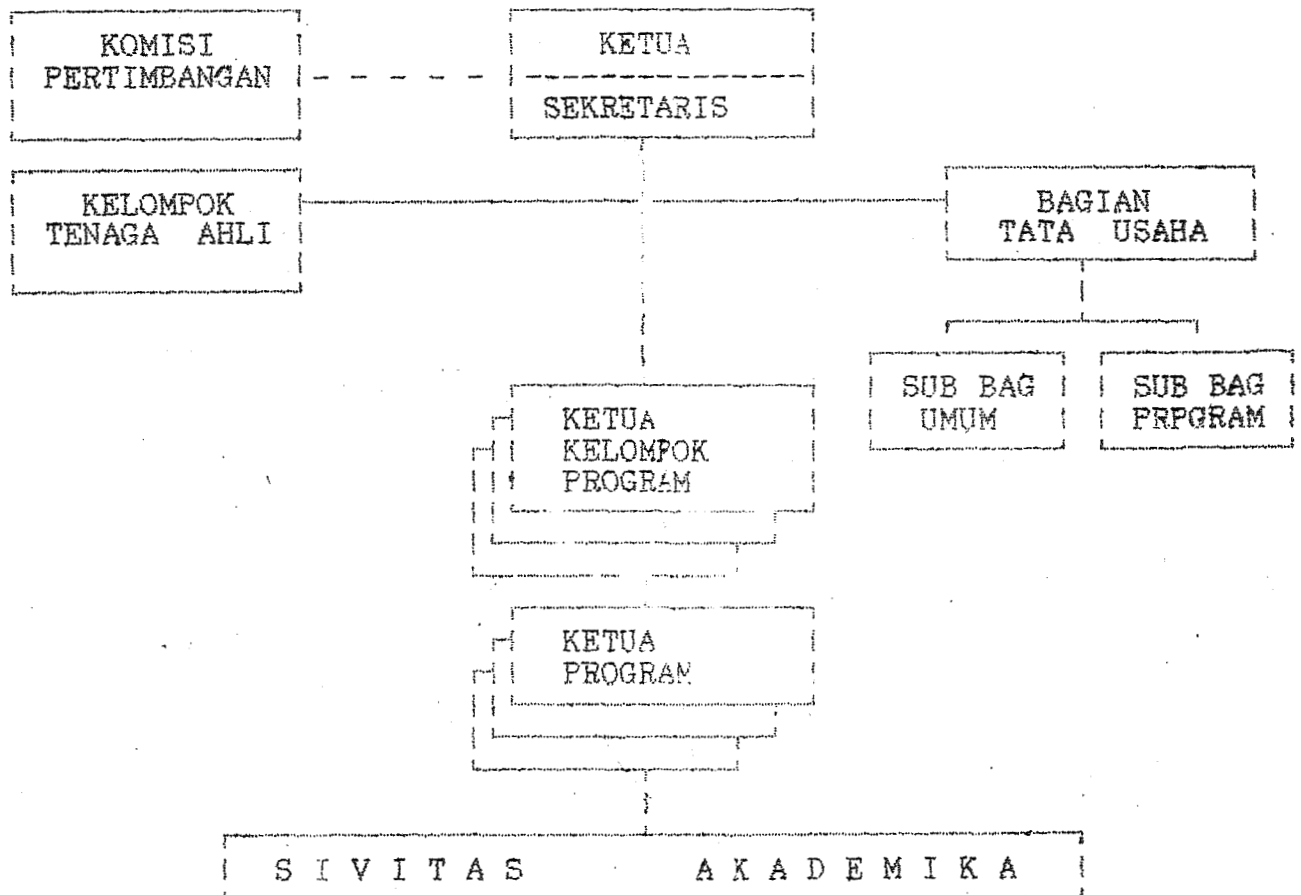
B. Struktur Organisasi LPM

Pemilihan struktur organisasi lini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut. Pertama, struktur organisasi ini cocok untuk diterapkan pada LPM karena terdapat keragaman tanggung jawab, wewenang, dan tugas dari orang-orang yang

terlibat dalam lembaga ini. Keragaman tersebut berkaitan pula dengan fungsi pimpinan dan staf. Kedua, orang-orang yang terlibat dalam lembaga dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lini dan kerompok staf. Kelompok lini mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pokok lembaga, sedangkan kelompok staf berkewajiban untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok lembaga. Staf dibentuk dengan tugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan yang dilakukan lembaga. Ketiga, Pimpinan LPM melakukan hubungan langsung ke atas (Rektor), ke bawah (sivitas akademika), dan ke samping (Fakultas/Lembaga). Dalam struktur organisasi lini dan staf ini memungkinkan lembaga pengabdian pada masyarakat untuk menyeimbangkan perhatian terhadap lingkungan dalam dan luar lembaga.

Struktur organisasi lembaga pengabdian pada masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi
 lembaga pengabdian pada masyarakat



..... Garis Konsultasi
 _____ Garis Fungsional

Ketua Lembaga diangkat oleh Rektor atas nama Menteri, bertanggung jawab kepada Rektor, dengan masa jabatan 4 tahun untuk setiap periode. Ketua lembaga, karena kedudukannya, menjadi Anggota Senat Perguruan Tinggi. Ketua dibantu oleh Sekretaris Lembaga yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Komisi pertimbangan adalah tenaga akademik senior berasal dari dan diusulkan oleh fakultas-fakultas dan lembaga penelitian, diangkat/ditugaskan oleh Rektor atas persetujuan Ketua lembaga.

Kelompok Tenaga Ahli adalah tenaga akademik yang berasal dari Jurusan/Program Studi yang diusulkan oleh Fakultas dan atas permintaan/persetujuan Ketua Lembaga, diangkat/ditugaskan oleh Rektor.

Bagian/Sub Bagian Tata Usaha adalah tenaga administrasi yang ditugaskan oleh Rektor. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Program, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Ketua Kelompok Program berasal dari kelompok Tenaga Ahli, ditugaskan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga. Ketua Program berasal dari Kelompok Tenaga Ahli, ditugaskan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga. Masa jabatan Ketua Kelompok Program dan Ketua Program disesuaikan dengan kebutuhan dan lamanya waktu penyelenggaraan program.

Sivitas Akademika adalah tenaga akademik dan mahasiswa.

C. Mekanisme Lembaga

Dalam melaksanakan fungsinya, mekanisme lembaga pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan ditingkat perguruan tinggi.
2. Mengkoordinasi penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas, Pusat, Unit Pelaksana Teknis, Jurusan, Laboratorium, dan Tenaga Akademik baik kelompok maupun perorangan
3. Melakukan kerjasama, atas nama pimpinan perguruan tinggi, mengenai pengabdian kepada masyarakat, dengan perguruan tinggi dan badan-badan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri

4. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan unit-unit lain dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Ikut mengusahakan sumber daya, biaya dan sarana lainnya, yang diperlukan dalam pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyelenggarakan seminar hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Menyebarkan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Memberikan penghargaan terhadap pelaksana dan sasaran pengabdian kepada masyarakat.
9. Menyusun dan mengembangkan peloman dan program-program pengabdian kepada masyarakat dilingkungan perguruan tinggi masing-masing
10. Melaksanakan urusan tata usaha lembaga pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme di atas memerlukan adanya kesepakatan dan dukungan dari semua komponen di perguruan tinggi dan Perlu upaya sosialisasi mekanisme tersebut kepada seluruh sivitas akademika.

DAFTAR BACAAN

- Blanchard, Kenneth H. and Hersey, Paul (1982). Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. New Jersey: Prentice-Hall.
- Flippo, Edwin B. and Musinger, Gary M. (1975). Management. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- LPM IKIP Bandung (1988). Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat IKIP Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Schmerhorn, John R., Hunt, James G., and Osborn, Richard N. (1985). Managing Organizational Behavior. New York: John Wiley and Sons.

STRUKTUR ORGANIASASI DAN MEKANISME KERJA KELEMBAGAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT *)

Oleh : Drs. Jonihanto Wasimun, MS.**)

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi maka semua kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat harus dilaksanakan dengan seimbang, karena ketiga dharma tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling tergantung dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu hasil-hasil yang didapat lewat pendidikan, pengajaran dan penelitian perlu diamankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Pengabdian pada masyarakat merupakan sarana dalam proses belajar mengajar untuk pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara melembaga guna membantu, membimbing, melayani dan mengarahkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Perguruan Tinggi memungkinkan warga masyarakat untuk mendapat maupun meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan sehingga dengan pengetahuan dan keterampilan yang didapatnya memungkinkannya untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat di Perguruan Tinggi dapat menunjang perkembangan masyarakat gemar belajar dan menunjang pendidikan luar sekolah.

II. STRUKTUR ORGANISASI

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.

A. Tugas

Lembaga Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas :

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

*) Makalah Disajikan pada Sarasehan PPM II, pada tanggal 2 Maret 1991 di LPM Institut Pertanian Bogor

***)Ketua LPM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

2. Meningkatkan relevansi program Universitas/Institut dengan kebutuhan masyarakat
3. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan
4. Melaksanakan pembangunan wilayah/daerah dan konsepsi pembangunan yang sesuai untuk pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Badan-badan lainnya di dalam maupun di luar negeri.

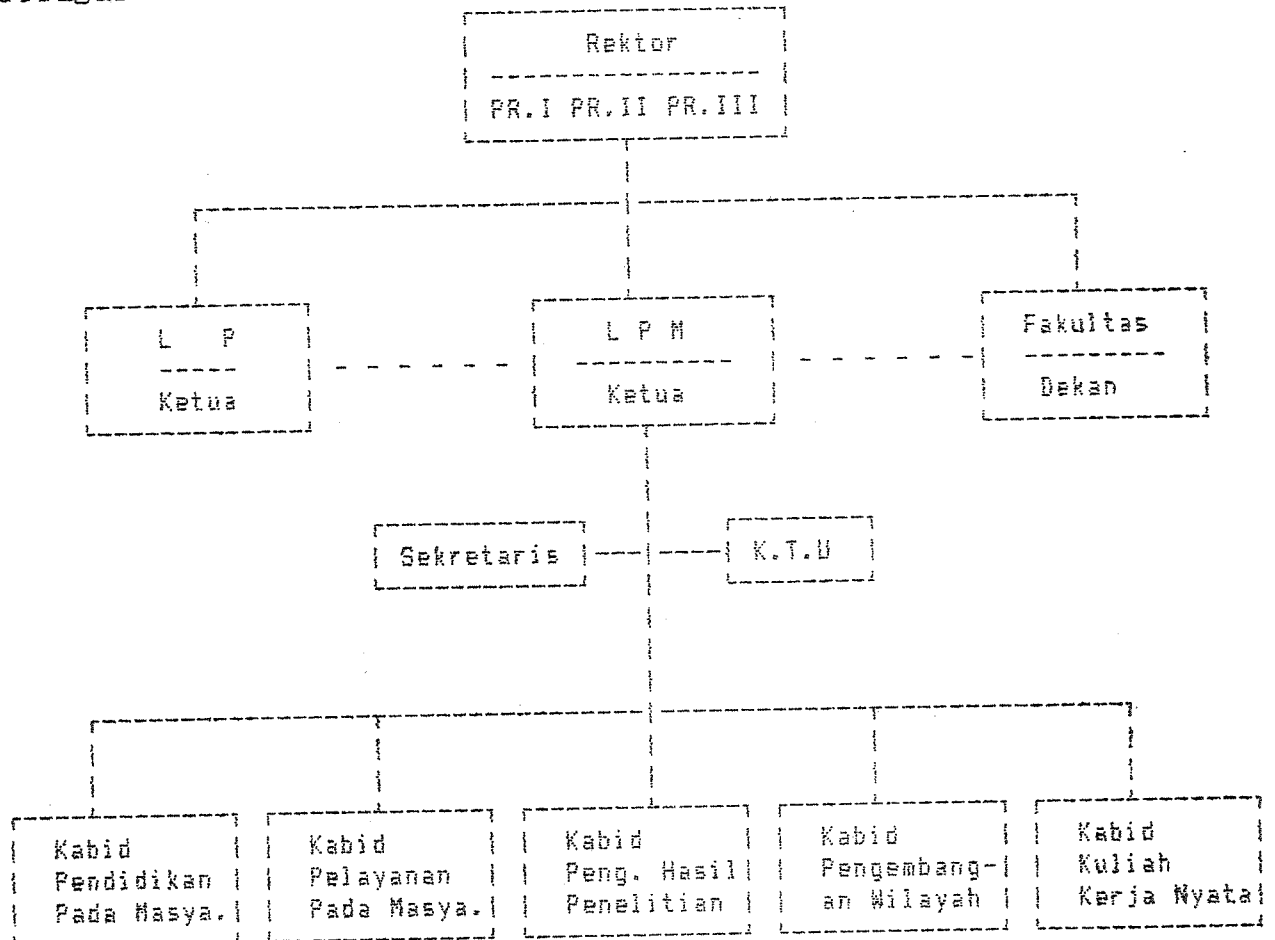
B. Fungsi

Fungsi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat ialah :

1. Menyelenggarakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pengabdian pada masyarakat.
2. Merintis, melaksanakan, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan Dinas/Jawatan, Instansi dalam rangka mensukseskan program pengabdian pada masyarakat.
3. Mengusahakan dana dari sumber-sumber lain untuk lebih mensukseskan program pengabdian pada masyarakat.
4. Membantu/merintis program-program pendidikan luar sekolah.
5. Menyelenggarakan dan mengusahakan pertemuan-pertemuan antardisiplin ilmu, untuk menelash masalah-masalah yang akan digarap dalam program pengabdian pada masyarakat sehingga terjadi integrasi antardisiplin ilmu.
6. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program yang dilaksanakan Lembaga kepada masyarakat.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat sebagai berikut :



1. Rektor : Pengarah

2. Ketua LPM mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas-fakultas, Jurusan, Program Studi.
- Mengurus, membina dan mengembangkan program-program pengabdian pada masyarakat
- Mengusahakan dan mengembangkan hubungan dengan pelbagai Universitas/Institut, Dinas, Jawatan di luar Institutnya.
- Mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak di luar Institut dengan sepengetahuan Rektor
- Membina dan mengembangkan tenaga-tenaga pengelola pengabdian pada masyarakat.

3. Sekretaris LPM: Mempunyai tugas dan wewenang membantu dan mewakili Ketua LPM serta mengurus pelaksanaan administrasi lembaga
4. Kepala Tata Usaha : Melayani teknis dan administrasi dilingkungan lembaga pengabdian pada masyarakat.
5. Kepala Bidang Pendidikan pada Masyarakat : Mempunyai tugas mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan luar sekolah dalam rangka pendidikan seumur hidup.
6. Kepala Bidang Pelayanan pada Masyarakat : Memberikan dan membina pelayanan secara profesional kepada masyarakat yang membutuhkan, yang berbentuk antara lain konsultasi dan bantuan hukum, konsultasi pertanian, perencanaan pengembangan pengairan dsb.
7. Kepala Bidang Pengembangan Hasil Penelitian : Mempunyai tugas mengembangkan hasil-hasil penelitian menjadi produk baru berupa pengetahuan terapan, teknologi siap pakai, cara kerja, metode baru dsb.
8. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah: Mengusahakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sehingga bisa menghasilkan konsep perencanaan pembangunan wilayah terpadu dan bersifat komprehensif sehingga secara langsung menunjang proses pembangunan.
9. Kepala Bidang KKN: Bertugas merencanakan, mengelola, membina dan mengembangkan serta melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata.

III. MEKANISME KERJA

1. Hubungan antara Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dengan Universitas/Institut.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980 pasal 5 menyatakan bahwa Organisasi Universitas/Institut terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan : Biro
- 3) Unsur Pelaksana : Fakultas, Lembaga Penelitian, Lembaga pengabdian pada Masyarakat.
- 4) Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis dan Instalasi

Jadi dapat dikatakan bahwa Universitas/Institut merupakan sistemnya, sedang fakultas, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat merupakan sub sistemnya.

Hubungan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dengan Universitas/Institut dinyatakan dalam pasal 38 P.P. No. 5 Tahun 1980 yang berbunyi : "Lembaga Pengabdian pada Masyarakat adalah unsur pelaksana Universitas/Institut dibidang pengabdian pada masyarakat yang berada di bawah Rektor. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dipimpin seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor".

Jadi LPM merupakan subordinasi Rektor, karenanya Ketua LPM mendapat pendelegasian kekuasaan dari Rektor dalam bidang pelaksanaan penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat, dan Ketua LPM bertanggung jawab kepada Rektor. Adapun tugasnya adalah melaksanakan pembinaan dengan berpedoman ketentuan yang ditetapkan bagi Universitas/Institut yang bersangkutan (Pasal 39).

Mengingat Lembaga Pengabdian pada Masyarakat merupakan unit pelaksana maka hubungan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dengan Universitas/Institut dalam pelaksanaan tugas pokok adalah sinkronnya serta terkaitnya program-program Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dengan program-program Universitas/Institut berdasarkan suatu kebijaksanaan yang mantap.

2. Hubungan antara Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dengan Fakultas dan Lembaga Penelitian.

Dalam P.P. No. 5 tahun 1980 Universitas diartikan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu sering dinyatakan bahwa pendidikan merupakan kegiatan penyampaian ilmu pengetahuan, penelitian merupakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, sedang pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan adanya hubungan antara kegiatan pendidikan sebagai kegiatan penyampaian ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian sebagai kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengabdian pada masyarakat sebagai kegiatan penerapan ilmu pengetahuan.

Dipandang secara organisatoris berarti ada hubungan antara Fakultas, Lembaga Penelitian dengan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, dengan saling memberi umpan balik antara ketiga badan tersebut. Adanya hubungan yang saling memberi umpan balik ini maka dalam pelaksanaan tugas masing-masing diperlukan adanya koordinasi kesamping. Dengan adanya koordinasi kesamping memungkinkan timbulnya kegiatan saling membantu, saling menunjang, saling mengisi serta saling melengkapi. Untuk menjaga kesinambungan hubungan tersebut, perlu diadakan forum komunikasi untuk pengadaan informasi yang memungkinkan program/proyek masing-masing dapat serasi, dapat saling menunjang dan melengkapi.

Dalam mengadakan koordinasi kesamping, maka agar supaya tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan koordinasi Pembantu Rektor dengan koordinasi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dibidang kegiatan pengabdian pada masyarakat perlu diadakan pembagian kerja. Pembantu Rektor mengadakan

koordinasi dibidang policy, sedang Lembaga Pengabdian pada Masyarakat mengadakan koordinasi dibidang teknis operasional.

IV. MASALAH YANG PERLU DISELESAIKAN

Diantara masalah-masalah yang perlu diperhatikan untuk dapat diselesaikan antara lain :

1. Penghargaan terhadap kum bidang pengabdian pada masyarakat. Bila dibandingkan dengan penghargaan kum untuk kegiatan-kegiatan penelitian terasa amat jauh berbeda, misal untuk kegiatan penelitian dengan waktu 6 bulan atau bahkan 3 bulan bisa mendapat kum 10 untuk penelitian mandiri, sedang untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan waktu yang sama, buku laporannya hanya dinilai/mendapat kum 2. Kenyataan ini menyebabkan gairah para tenaga pengajar untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat dikatakan amat rendah.
2. Peraturan angka kredit untuk kenaikan pangkat yang dikeluarkan oleh Dirjen DIKTI DEPDIKBUD rasanya tidak menunjang kegairahan tenaga pengajar untuk berpartisipasi dalam bidang kegiatan pengabdian. Bila untuk bidang Pendidikan, Pengajaran dan Penelitian dituntut minimal 25 % dari jumlah kum yang harus dipenuhi, maka untuk bidang pengabdian pada masyarakat dituntut maksimal 15 %. Dampaknya banyak tenaga pengajar yang asal saja melaksanakan pengabdian, dapat 2 kum sudah bisa naik pangkat. Sekali lagi penghargaan terhadap bidang pengabdian pada masyarakat rendah sekali.
3. Dibeberapa Universitas tampaknya kegiatan pengabdian pada masyarakat masih belum dipolakan dalam satu wadah baik Lembaga, Pusat, Balai Pengabdian pada Masyarakat. Akibatnya terjadi kesimpang siuran dalam pelaksanaannya. Contohnya bila ada tawaran kerjasama dengan Instansi di luar Perguruan Tinggi, seringkali tidak melalui Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian pada Masyarakat. Sedangkan untuk Penelitian segala permintaan, kerjasama harus melalui Lembaga/Pusat/-Balai Penelitian.

V. P E N U T U P

Demikianlah makalah yang dapat saya kemukakan dalam Sarasehan Pengabdian pada Masyarakat II ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 23 Februari 1991

BAHAN BACAAN

1. Buku Laporan Penataran Tenaga Staf Pengelola PPM dan KKN Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin 1988/1989.
 2. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Dirjen Pendidikan Tinggi : Petunjuk Pelaksanaan MPK 1982 Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
 3. Margono Slamet, Metodologi Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta 1986.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 1980 tentang : Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut
 5. Suhardi, Drs., Organisasi Kelembagaan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dep. P & K, Dirjen DIKTI, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 1983.
-

PROGRAM-PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

DALAM MEMASUKI JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN TAHAP DUA *

Oleh:

**

Bahrein T. Sugihen dan Rosnani Sahardin

I

Universitas yang mendapat "land or sea grant" atau keduanya di Amerika Serikat umumnya mempunyai departemen yang disebut Extension Education. Di beberapa tempat, bahkan, departemen ini menjadi Extension and International Education. Sering juga dikenal program Agricultural Extension. Departemen Pertanian Pemerintah Federal biasanya menjadi partner yang tetap di dalam mengembangkan berbagai program extension tersebut. Salah satu tugas utama dari lembaga ini ialah merencanakan dan melaksanakan penyuluhan, mengembangkan dan memperkenalkan atau menyebar luaskan berbagai teknologi yang tepat guna kepada masyarakat sasaran yang dipilih di luar kampus. Kendati masyarakat sasaran banyak yang berdomisili di kota, kebanyakan klien kegiatan lembaga itu adalah masyarakat pedesaan, terutama petani dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. (LSU, 1982; Murray, n.d.)

Filsafat yang mereka pakai dalam mengemban dan mengembangkan tugas kelembagaan tersebut yang mereka rancang berorientasi kepada upaya membantu masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam memecahkan persoalan dan berbagai masalah yang mereka hadapi lewat berbagai upaya sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Di dalam kegiatan mereka membantu masyarakat, sering, lembaga ini, karena berbagai keterbatasan dalam sumber daya mereka, bekerja sama atau meminta lembaga lain yang sesuai untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan program.

*

Makalah Disajikan pada Sarasehan PPM II, pada tanggal 2 Maret 1991 di LPM Institut Pertanian Bogor.

**

Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) Universitas Syiah Kuala.

Asisten Peneliti, staf pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Di Indonesia, kendati tak disebut secara eksplisit dalam satu pedoman atau petunjuk pelaksanaan (juklak), program pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan universitas sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi, cenderung juga mengadopsi prinsip yang sama dengan prinsip yang dipakai dalam program ekstensen universitas "land atau sea grant" itu. Bedanya, agaknya, terletak dalam sumber dana, pelaksanaan kegiatan karena perbedaan berbagai karakteristik sosial budaya masyarakat sasaran, dan para "agen" dalam arti para pengabdian. Perbedaan karakteristik teknologi juga mempengaruhi cara dan hasil desiminasi tersebut.

Pembangunan, pada dasarnya, merupakan upaya berencana untuk merubah perilaku masyarakat sasaran kegiatan pembangunan itu. Kegiatan program pengabdian masyarakat, dilihat dari berbagai sudut pandang, mempunyai sasaran dan tujuan yang sama juga dengan sasaran dan tujuan pembangunan itu. Bahkan kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilihat sebagai terjemahan dari tujuan pembangunan itu Slamet, 1986). Kegiatan atau proyek pengabdian masyarakat, pada dasarnya, merupakan pembangunan dalam skala yang lebih kecil, lebih spesifik.

Pembangunan tahap kedua menjelang tahun dua ribuan, atau masa pembangunan dua puluh lima tahun yang akan datang bagi Indonesia merupakan era tinggal landas, abad peralihan dari pertanian ke industrialisasi. Dampaknya bagi kehidupan dan peri laku kita akan besar sekali. Proses globalisasi akan lebih luas pengaruhnya bagi kehidupan kita. Mungkin kita memerlukan resosialisasi atas berbagai hal dari peri-laku tertentu kita agar kita bisa tetap hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang serasi. Penduduk Indonesia mungkin akan lebih dari dua ratus juta. Pada sensus tahun 1990 yang lalu penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan tinggal hanya enam puluh lima persen lagi, menurun dari delapan puluhan persen pada sensus sebelumnya. Dalam dua atau tiga sensus yang akan datang angka 65 persen itu bisa jadi turun di bawah angka lima puluh, atau mungkin bahkan mendekati angka empat puluh. Urbanisasi termasuk perluasan desa menjadi kota yang meningkat memerlukan penyediaan lapangan pekerjaan yang non-pertanian. Perluasan lahan usaha tani terbatas dan penambahan penduduk pedesaan yang memasuki pasar lapangan kerja relatif lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Penyediaan lapangan kerja di pedesaan agaknya lebih terbatas.

Dalam gambaran keadaan yang agak dramatik dan tak terlalu optimistik itu, kita mulai dapat bertanya tentang bagaimana kira-kira Program dan pengembangan program pengabdian pada masyarakat dalam rangkaian kegiatan tridarma

di dalam pembangunan tahap kedua itu. Sebagai suatu kegiatan tridarma perguruan tinggi, program yang bagaimana yang patut dikembangkan tanpa meninggalkan konsep dasar pengabdian pada masyarakat itu.

Tulisan ini merupakan suatu upaya untuk mengetengahkan beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan program pengabdian pada masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan kedua darma yang lain.

II

Pengembangan program pengabdian pada masyarakat sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi, terutama dalam memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua yang akan datang, memerlukan dasar-pikir yang memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor. Pengabdian pada masyarakat, betapa pun, merupakan upaya formal dan melembaga yang mencoba mengkaitkan keberadaan satu perguruan tinggi dengan masyarakat pendukungnya di sekelilingnya di luar tembok kampus. Lingkungannya yang sering berubah cepat sebagai hasil yang konkomitan dari perubahan di dalam masyarakat sering mempengaruhi kampus, dan sebaliknya. Kampus sebagai pusat intelektual, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pun pada prinsipnya merupakan pusat sumber perubahan itu sendiri (Hasan, 1976). Dengan perkataan lain, lembaga dan kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan satu jembatan ampuh yang menghubungkan dunia akademi dan masyarakat yang menjadi konsumen aplikasi ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dikembangkan di dalam lingkaran kampus itu. Oleh karena itu, dalam penyusunan program pengabdian pada masyarakat itu, kita perlu melihat dan mempertimbangkan antara lain:

1. masa depan Indonesia. Dalam kata lain proyeksi kondisi pembangunan kita di dalam jangka panjang tahapan yang kedua. Dari GBHN, diskusi, bahasan para pakar dan lain-lain dapat menjadi rujukan. Proses globalisasi, perubahan sosial, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan berkembang cepat. Pengaruh proses perubahan tersebut akan terasa besar. Pembangunan jangka panjang tahapan kedua yang akan datang akan lebih mempertegas transformasi dari sektor pertanian (usaha tani) ke sektor industri sebagaimana kecenderungan yang terjadi sekarang (Umar, 1986) Perluasan lahan usaha tani semakin terbatas; penduduk pedesaan menjadi cenderung berkurang (dari 60 % dalam tahun 1980 menjadi 65 % di tahun 1990). Dengan demikian, pengembangan program pengabdian pada masyarakat harus dapat dikaitkan dan berorientasi pada

kecenderungan yang ada, terutama bagaimana agar masyarakat dapat "cope with" keadaan atau realitas yang mereka hadapi atau bentuk sendiri.

2. kondisi daerah atau lingkungan terdekat (immediate environment). Setapa pun, karena berbagai keterbatasan, masyarakat pendukungnya yang terdekatlah yang selalu menjadi kelompok sasaran pengabdian pada masyarakat suatu perguruan tinggi. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat disamping karakteristik geografis dan sejarah suatu daerah membuat dampak fungsi laten proses pembangunan itu tidak selalu sama dari suatu daerah ke daerah lain. Perbedaan yang berkait dengan kecenderungan pembangunan itu agaknya patut dibuat terlihat jelas di dalam program pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi itu sebagai suatu upaya manusiawi membantu masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri untuk "coping with" tatanan hidup yang baru.

3. kebijaksanaan nasional dalam pengabdian pada masyarakat. Berbeda dengan penelitian, secara eksplisit GBHN tidak menjelaskan apa dan bagaimana fungsi pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi itu. Undang-undang Pendidikan Nasional (UPN) pun tidak menjelaskan banyak tentang pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi itu. Perguruan tinggi swasta agaknya dapat saja mengabaikan darma yang ketiga ini. Demikian juga halnya dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990 itu, kecuali tentang kelembagaan pengabdian itu. Kebijakan yang masih terpakai agaknya masih "Kerangka Pengembangan Pengabdian Pada Masyarakat di Perguruan Tinggi di Indonesia" (KP3MPTI) tahun 1978 yang merupakan rujukan pokok dalam pengembangan program pengabdian pada masyarakat sekarang ini (Depdikbud, 1978).

4. kondisi perguruan tinggi nasional dan daerah. Kondisi satu perguruan tinggi saling berbeda di dalam berbagai faktor. Perbedaan tersebut dapat terletak pada sumber daya manusianya, dana, dan karakteristik masyarakat pendukungnya. Kecenderungan pola ilmiah pokok (PIP) yang dipilih, dan rencana induk pengembangan (RIP) yang dimiliki tiap universitas akan memberikan tekanan dan warna pada pengembangan program pengabdian pada masyarakat yang dirancang.

Dengan demikian, orientasi pengembangan program pengabdian pada masyarakat itu, terutama dalam memamsmuki jangka panjang pembangunan tahapan yang kedua yang akan datang, mempunyai dimensi yang banyak. Sasaran program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat menjadi lebih luas, termasuk masyarakat kampus sendiri. Objek atau materi pengabdian menjadi lebih berkembang sesuai dengan kemampuan para pengabdian dan dana yang tersedia. Berdasarkan pola pikir

seperti ini, agaknya, program pengabdian pada masyarakat itu perlu mempunyai satu landasan ideal, (Ismaun, 1976) dan suatu kebijaksanaan umum sebagai punca program (Correy, 1976). Program-program pengabdian pada masyarakat, dengan demikian, dapat disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan landasan ideal dan kebijaksanaan tersebut disamping faktor berbagai lingkungan dan kondisi sebagaimana yang disebut pada bagian-bagian awal bab ini.

Secara baku program pengabdian pada masyarakat itu terdiri dari lima program utama: a) pendidikan masyarakat; b) pelayanan pada masyarakat; c) pengembangan hasil penelitian; d) pengembangan wilayah secara terpadu; dan e) Kuliah Kerja Nyata (Depdikbud, 1978; Suyatna dan Slamet, 1986).

Jadi, program-program pengabdian pada masyarakat itu dalam memasuki jangka panjang pembangunan tahap yang kedua itu dapat mencakup:

1. meningkatkan, memantapkan pemahaman dan penghayatan para "pengabdian" tentang peranan dan tanggung jawab perguruan tinggi atas masyarakat pendukungnya di sekelilingnya.
2. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para "pengabdian" (ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan methodologi pengabdian pada masyarakat).
3. mencari, menemukan, dan mengembangkan lewat berbagai upaya (termasuk lewat penelitian, eksperimen) berbagai teknologi inovatif untuk disebarluaskan (dikomunikasikan) lewat berbagai saluran media dan cara dalam upaya membantu masyarakat agar mereka mampu membantu dirinya sendiri, di samping pengembangan hasil hasil penelitian menjadi produk baru yang dapat (langsung) dimanfaatkan masyarakat.
4. mengembangkan kerja sama institusional dengan berbagai pihak (instansi pemerintah, para enterprenir dalam merencanakan, melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam upaya pengembangan wilayah secara terpadu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan undang-undang, peraturan, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.
5. menyebar-luaskan, mengkomunikasikan lewat berbagai upaya saluran, inovasi-innovasi, temuan-temuan teknologi yang berdaya dan berhasil guna bagi masyarakat dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan dan mengaktualisasikan diri mereka.

6. membina dan mengembangkan usaha tani (teknologi pra-tanam sampai pasca panen) termasuk teknologi usaha peternakan, dan perikanan dan usaha tani lainnya yang sifatnya "income generating".
7. membina dan mengembangkan usaha industri pedesaan (industri rumah-kecil dan kerajinan) di kalangan masyarakat pedesaan dan perkotaan termasuk pemanfaatan waktu senggang limbah rumah tangga sehingga mereka dapat lebih produktif.
8. membina dan mengembangkan koperasi dan kelompok usaha bersama lainnya sehingga lembaga tersebut dapat berperan sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang tangguh, termasuk pembinaan anggota dan pengurus.
9. membina dan mengembangkan lingkungan hidup yang sehat dan asri lewat berbagai upaya termasuk penghijauan, reboisasi, penyehatan, pemukiman dan lain-lain.
10. membina dan mengembangkan lingkungan sumber daya manusia agar mampu membantu dirinya sendiri dan orang lain.
11. membina dan mengembangkan sistem dan pola pemerintahan desa, dan komunitas, lembaga fungsional kemasyarakatan (adat) dan lembaga swadaya masyarakat.
12. membina dan mengembangkan komunikasi kemasyarakatan dalam upaya pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa.
13. membina dan mengembangkan peranan dan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan kegiatan lain yang sejenis.
14. memberi pelayanan secara profesional pada masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan, dalam memecahkan atau mencari pemecahan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
15. membina dan mengembangkan pendidikan non-formal (dalam kaitan pendidikan sepanjang hidup) dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan (mental dan fisik).

Agaknya, kelimabelas butir di atas dapat diperkembangkan lagi. Bahkan, tiap Universitas pada dasarnya dapat memperpanjang daftar tersebut sesuai dengan karakteristik dan problema yang dihadapi masyarakat pendukungnya di daerahnya masing-masing. Tiap perguruan tinggi, bila kondisi masing-masing lembaga menghendaki, dapat melanjutkan tiap butir menjadi sub-program. Namun, bila program-program tersebut disederhanakan, agaknya semuanya dapat dikelompokkan ke dalam program: a).

pengembangan institusional; b). pengembangan produk penelitian; c). penyebarluasan tekno-logi; d). pelayanan pada masyarakat; e). pengembangan wilayah terpadu; f). pengembangan sumber daya manusia; g). pembinaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

III

Dari sudut pandang tertentu, seperti sosiologi, pembangunan itu merupakan suatu upaya yang berencana untuk mengubah berbagai aspek sosial. Dalam kata lain merubah perilaku sosial masyarakat. Sering ini dikaitkan dengan tingkat kemakmuran. Kegiatan pengabdian pada masyarakat pun sesungguhnya akan bermuara pada delta yang sama. Yang mungkin berbeda adalah skala perubahan itu, cara atau metodologi yang dipakai dalam memperkenalkan perubahan yang direncanakan itu, sumber dan jumlah dana yang terpakai. Dengan premis yang seperti itu kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dirancang dan dikembangkan lewat perguruan tinggi sebagai kegiatan tridarma merupakan kegiatan pembangunan. Secara formal kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan penunjang program pembangunan yang inisiatif utamanya berada di tangan pemerintah.

Program-program pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi yang disusun merupakan pula refleksi atau saling bersangkutan paut dengan program pembangunan yang tengah digalakkan pemerintah. Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai fungsi sosial yang luas lewat tridarma perguruan tinggi itu, Universitas dapat berperan besar. Sejak tahun-tahun awal Orde Baru Indonesia itu, program perguruan tinggi telah memperlihatkan prakarsa yang besar dalam proses pembangunan Nasional. Universitas tampil di depan untuk memperkenalkan model-model dan gagasan pembangunan dalam suatu pola kerjasama yang serasi di antara perguruan tinggi dengan pemerintah. Banyak personil perguruan tinggi yang direkrut pemerintah, di pusat dan daerah, untuk menjadi perencana dan pelaksana pembangunan (Ibrahim, 1973; Hasan, 1976; Atmakusuma, et.al. 1974). Dalam pola dan tekanan yang berbeda dari ABRI, perguruan tinggi pun mempunyai dwifungsi atau bahkan multifungsi lewat lembaga pengabdian pada masyarakat itu.

Banda Aceh, 25 Februari 1991.

DAFTAR REFERENSI

- Atmakusuma, A., et. al., 1974 **The Role of The Provincial Universities in Region Development in Indonesia; an assessment.** Singapore, RIHED.
- Corey, Kenneth E. 1976. "Structures in the Planning of Community Change: a Personal Construct". dalam Warren G. Bennis, et. al. (eds), **The Planning of change.** 3rd. ed. New York, Holt, Rinehart and Winston.
- Depdikbud. 1978. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. **"Kerangka Pengembangan Pengabdian Pada Masyarakat di Perguruan Tinggi di Indonesia"**. Jakarta. Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- Hasan, Ibrahim, 1976. **Regional Universitas and Development Goals.** (A case study of Syiah Kuala University). Paper dibacakan di 6th Asian-United States Educators Conference Sapporo, Japan. Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala.
- Ibrahim, A. Majid. 1973. **Roles of Universities in Regional Development.** Paper dibacakan pada Workshop RIHED Penang, Malaysia. Perpustakaan Pusat Universitas Syiah Kuala.
- Iemaun. 1986. "Landasan Idial dan Pengertian Darma Pengabdian Pada Masyarakat." dalam Margono Slamet, ed. **Methodology Pengabdian Pada Masyarakat.** ed. ketiga. Bandar Lampung. Penerbit Universitas Lampung.
- LSU. 1982. Louisiana State University. **Commencement: Summer Term.** Baton Rouge, La. Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.
- McRobie, George. 1981. **Small is Possible.** New York. Harper and Row, Publishers.
- Murray, Mary Ann. n. d. **Learning Through Extension.** Lexington. University of Kentucky.
- Slamet, Margono. 1986. "Peranan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Dalam Pembangunan Pedesaan dan Perubahan Sosial dalam Margono Slamet, ed. **Mahasiswa dalam Pembangunan: Materi Pembekalan Kuliah Kerja Nyata.** Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Sugihen, Bahrain T, 1986. **Teknologi dan Perubahan Perilaku Sosial di Aceh**. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala.

Suyatna. I Gde, dan Margono Slamet, 1986. "Program Pengabdian Pada Masyarakat: Bentuk, Jenis dan Sifatnya". dalam Slamet (ed.), **Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat**, edisi ketiga, Bandar Lampung. Penerbit Universitas Lampung.

Umar, Faraz, 1986. Tujuan dan Khalayak Sasaran. Pengabdian Pada Masyarakat". dalam Slamet (ed.), **Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat**, Edisi ketiga. Bandar Lampung. Penerbit Universitas Lampung.

PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO *)

Oleh:

Ir. NISYAMBURI **)

PEMIKIRAN DASAR

Dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Struktur Organisasi Kelembagaan Pengabdian pada Masyarakat serta Syarat-syarat pembentukannya* pada PP No. 5 Tahun 1980 dinyatakan bahwa Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) adalah unsur pelaksana universitas dibidang pengabdian pada masyarakat yang berada di bawah Rektor. Dengan demikian tujuan, arah, sasaran serta langkah tindakannya haruslah mengacu dan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UNDIP merupakan bagian dan kesatuan dengan tujuan Universitas Diponegoro, yakni: "Menunjang tercapainya tujuan UNDIP sebagai pusat modernisasi dan pengembangan Ilmu, Teknologi dan Seni dengan mengacu pada pengembangan Wilayah Pantai sebagai Pola Ilmiah Pokok, dengan usaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk masyarakat".

Sesuai dengan kedudukan dan tugas LPM-UNDIP maka fungsi LPM-UNDIP untuk memenuhi tujuan LPM-UNDIP tersebut adalah :

- (1). Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk masyarakat.
- (2). Meningkatkan relevansi program UNDIP dengan kebutuhan masyarakat.
- (3). Melaksanakan pengembangan pola pembangunan dan konsepsi pembangunan yang sesuai untuk pengembangan dan pembangunan wilayah atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan lainnya di dalam dan luar negeri.
- (5). Melaksanakan urusan administrasi dan tata laksana lembaga.

Dari uraian di atas maka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mengandung makna membantu pemikiran dan

*) Makalah disampaikan pada Sarasehan Nasional Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Kedua, Perguruan Tinggi se Indonesia di Institut Pertanian Bogor, tanggal 2 Maret 1991.
**) Ketua LPM Universitas Diponegoro

konsep-konsep pembangunan daerah maupun nasional serta usaha-usaha penyebarluasan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disamping itu, juga pemberian bantuan atau jasa dari LPM - UNDIP dalam pemecahan masalah pembangunan bagi masyarakat.

Sesuai dengan kedudukan UNDIP sebagai lembaga pendidikan tinggi, maka dalam penerapan program pengabdian pada masyarakat, LPM-UNDIP berpegang pada prinsip-prinsip ilmiah, kelembagaan, manfaat langsung, integrasi dengan dua darma lainnya yaitu pendidikan dan penelitian, kerjasama dan edukatif, serta profesional.

Mempelajari kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program LPM-UNDIP selama lima tahun terakhir ini, dapat diungkapkan beberapa masalah dalam berbagai fungsi perencanaan dan penyusunan program pengabdian pada masyarakat sebagai berikut :

- (1). Masih lemahnya penerapan pendekatan sistem dalam perencanaan.
- (2). Masih belum berfungsinya manajemen sistem informasi secara efektif.
- (3). Keterlibatan seluruh unit LPM dalam perencanaan dan penyusunan program dalam satu sistem tatalaksana yang menyeluruh dan terintegrasi belum optimal. Akibatnya pengetahuan dan penghayatan dari tiap pelaksana unit terhadap pengertian arah, tujuan dan sasaran program pengabdian pada masyarakat tidak sepenuhnya dimiliki.
- (4). Penjabaran rencana dasar dan program ke dalam rencana tindakan sering terbentur kepada hambatan-hambatan ketenagaan dan anggaran. Pengerahan sumberdaya manusia dari tiap unit UNDIP dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat belum optimal, masih banyak tenaga staf pengabdian pada masyarakat yang "unemployed".

Masalah-masalah yang menyangkut perencanaan dan penyusunan program di atas membawa akibat dalam koordinasi dan pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat. Masalah pokok dalam dua hal ini adalah:

- (1). Pelaksanaan kegiatan masih bersifat "menunggu" dan kurang terprogram secara sistematis.
- (2). Koordinasi pelaksanaan antara unit LPM, Fakultas, Unit lain dan Jurusan belum terjalin secara terpadu.
- (3). Pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di dalam dan di luar UNDIP belum optimal.

STRATEGI DASAR

Bertitik tolak dari masalah-masalah di atas dan kaitannya dengan tujuan pengabdian pada masyarakat yang ingin di capai

UNDIP, maka perlu dirumuskan strategi atau siasat. Strategi dapat diartikan sebagai berikut :

- (1). Dia adalah visi yang diarahkan pada apa yang harus dicapai oleh LPM-UNDIP.
- (2). Dia merupakan kerangka yang membiimbing serta mengendalikan pilihan-pilihan dalam menetapkan sifat dan arah kegiatan pengabdian pada masyarakat dari LPM-UNDIP.
- (3). Pada hakikatnya, strategi merupakan suatu *interpretative-planning*. Artinya dalam proses pelaksanaan, suatu perencanaan yang telah ditentukan perlu diinterpretasikan untuk lebih mempercepat proses pencapaian rencana tersebut.

Strategi dasar untuk mencapai tujuan LPM-UNDIP, utamanya ditinjau dari fungsi perencanaan dan perumusan program direncanakan sebagai berikut :

1. *Konsolidasi*

Konsolidasi organisasi dimaksudkan sebagai usaha pengukuhan sendi-sendi dan mekanisme organisasi seperti pedoman pokok pengelolaan pengabdian pada masyarakat di UNDIP, personalia, administrasi, tatakerja dan anggaran agar mencapai hasil dan dayaguna yang optimal. Untuk itu konsolidasi dapat dilakukan ke dalam dan ke luar LPM-UNDIP secara berkesinambungan dan berencana.

2. *Integrasi*

Integrasi dimaksudkan sebagai suatu usaha yang bertujuan agar semua unsur unit organisasi di UNDIP dapat mengetahui dan menghayati tujuan, arah dan sasaran yang hendak dicapai UNDIP. Dengan demikian, sejak awal semua unit pengabdian pada masyarakat UNDIP sudah harus diserasikan dalam melihat pandangan kedepan, menelaah tujuan dan sasaran pengabdian pada masyarakat serta mengolah kemampuan sumber potensi yang ada. Selain itu tiap program pengabdian pada masyarakat haruslah terintegrasi dengan program kelompok sasaran pengabdian pada masyarakat, dan juga dengan program dharma pendidikan dan penelitian yang berupa desiminasinya. Karena itulah upaya memasyarakatkan dharma pengabdian pada masyarakat dilingkungan UNDIP tidaklah semata-mata dilakukan LPM tetapi juga dilakukan oleh fakultas dan jurusan. Selain itu proses diseminasi hasil penelitian UNDIP perlu terus ditingkatkan bagi keperluan pengabdian pada masyarakat dilingkungan UNDIP oleh unit-unit.

3. *Pengembangan*

Bobot rencana dasar program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat semestinya lebih berorientasi pada pencapaian

tujuan dan sasaran serta pengembangannya disamping tugas-tugas rutin. Untuk itu produk-produk penelitian utamanya yang dilakukan UNDIP perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat. Dipandang dari dimensi siklus waktu, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat secara mantap terus-menerus harus mencari dan memasyarakatkan gagasan atau konsep pembangunan kepada berbagai kelompok sasaran. Jadi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat tidak pasif menunggu permintaan.

Strategi di atas secara operasional perlu dijabarkan lebih lanjut pada tiap tingkat unit organisasi. Sifat dari strategi itu haruslah luwes dalam arti selalu ditinjau dan dinilai kembali pada priode-priode tertentu. Strategi operasional yang jelas dan didukung oleh pelaksanaan yang efektif diharapkan akan menyamai sukses program sebelumnya dan bahkan meningkat dimasa depan.

RENCANA DASAR DAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Beberapa pertimbangan

Dalam penyusunan rencana dasar dan program pengabdian pada masyarakat oleh UNDIP dipakai beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Peranan perguruan tinggi dimasa mendatang akan semakin penting sebagai subsistem pendidikan nasional dan sarana nasional bagi pembangunan dan modernisasi, utamanya dalam pembinaan mutu sumberdaya manusia. Dengan demikian seharusnya perguruan tinggi peka dan siap dalam menghadapi fenomena dan masalah-masalah pembangunan yang terjadi di tanah air ini.
2. UNDIP sebagai suatu pusat modernisasi relatif telah cukup berpengalaman dalam pelaksanaan darma-darma pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Namun demikian, semakin tinggi dan semakin banyaknya frekwensi dan volume pembangunan maka semakin dituntutnya sikap memsitifitas UNDIP terhadap masalah-masalah yang timbul. Dengan dasar UNDIP secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. UNDIP haruslah melembagakan kegiatan-kegiatan yang bercorak ilmiah atau profesional dengan melahirkan gagasan-gagasan, konsep-konsep dan model-model pembangunan pada umumnya.
3. Agar UNDIP mampu memaksimumkan peranan serta sumbangannya bagi pembangunan nasional bangsa Indonesia, maka dalam darma pengabdian pada masyarakat disusunlah suatu rencana dasar pengabdian pada masyarakat Universitas Diponegoro.

Rencana Dasar

Rencana dasar LPM UNDIP yang merupakan rencana jangka panjang adalah pengembangan pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat sehingga kedudukan LPM dapat sejajar dengan kedua lembaga darma lainnya. Untuk itu perlu ditingkatkan usaha-usaha pemantapan dalam bidang organisasi dan program serta pengerahan potensi sumberdaya manusia UNDIP.

Dalam rencana dasar tersebut, maka hal-hal yang perlu dikembangkan meliputi :

- (1). Sistem komunikasi yang lancar baik di dalam seluruh satuan dan komponen yang ada di UNDIP maupun di luar UNDIP dengan staf pengajar, mahasiswa, administrasi, pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
- (2). Pengelolaan sistem informasi yang efektif tidak saja bermanfaat dalam penyusunan rencana dan program tetapi juga dalam usaha mempublikasikan karya-karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi kebutuhan masyarakat.
- (3). Pola pendidikan dan pelayanan pada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan pada umumnya.
- (4). Pola pengembangan teknologi, utamanya yang menyangkut teknologi tepat ataupun teknologi pedesaan.
- (5). Pola pengembangan wilayah, utamanya yang menyangkut wilayah pedesaan dalam kaitannya dengan perencanaan dari bawah.
- (6). Gagasan-gagasan berupa konsep pembangunan utamanya dan darma pengabdian pada masyarakat umumnya bagi kepentingan nasional.

Program Pengabdian pada Masyarakat

Bidang dan jenis program pengabdian pada masyarakat yang dilakukan UNDIP dan perlu dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kelembagaan:

1.1 Tujuan:

Meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak (di dalam dan di luar UNDIP) agar tercapai arus koordinasi dan konsultasi program yang efektif dan timbal balik.

1.2 Kelompok sasaran:

Unit-unit di UNDIP dan pihak luar UNDIP (Pemerintah Pusat dan Daerah serta Swasta):

1.3 Jenis Program antara lain :

- a. Hubungan di dalam UNDIP
 - a.1 Pengadaan, penyediaan dan pengarahan staf pengajar, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta fasilitas.
 - a.2 Koordinasi dan sinkronisasi program pengabdian pada masyarakat dengan unit-unit di UNDIP (Fakultas, Lembaga Penelitian, Badan Pengelola, Politeknik, dan Jurusan).
 - a.3 Tukar menukar informasi tentang hasil pengabdian, penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan unit-unit di UNDIP.
- b. Hubungan ke luar UNDIP
 - b.1 Tukar menukar informasi yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.
 - b.2 Pertemuan ilmiah berkala secara teratur
 - b.3 Penyediaan dana dan fasilitas bagi pengisian kerjasama.
 - b.4 Pemantauan dan evaluasi program kerjasama secara teratur.

2. Bidang Pengembangan Wilayah

2.1. Tujuan:

- (1). Menguji dan mencari pendekatan perencanaan wilayah dalam pembangunan di beragam tingkat wilayah.
- (2). Menguji dan mencari pendekatan pembangunan pedesaan untuk suatu wilayah tertentu.

2.2. Kelompok sasaran:

Perencana dan pengambil keputusan dari tingkat dusun sampai tingkat pusat, serta masyarakat luas.

2.3. Jenis program antara lain:

- a. Pengembangan desa kerjasama sesuai dengan karakteristik wilayah dalam bentuk action research (kaji tindak) dan berkesinambungan.
- b. Kaji tindak pengembangan Unit Daerah Kerja Pembangunan.
- c. Kaji tindak pengembangan lembaga-lembaga ekonomi pedesaan.
- d. Mengembangkan manajemen sistem, informasi ditingkat pedesaan sebagai upaya mendorong pelaksanaan sistem UDKP.

- e. Penyusunan program-program pengembangan wilayah pedesaan secara terpadu.
- f. Kaji tindak pengembangan konservasi lahan dan sistem usaha tani di daerah pantai.
- g. Kaji tindak pemanfaatan sumber-sumber pendapatan, sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia secara optimal di wilayah tertentu.
- h. Meningkatkan pelaksanaan konsultasi dalam berbagai kegiatan pembangunan.

3. Bidang Pengembangan Teknologi

3.1. Tujuan:

- (1). Menguji dan mengkaji teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan untuk/oleh masyarakat.
- (2). Mengembangkan konsep-konsep teknologi perangkat lunak dan perangkat keras dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia
- (3). Mengkaji dan memperbaiki konsep-konsep teknologi baik yang menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunak untuk disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat.
- (4). Mengkaji dan membuat rekayasa terhadap konsep-konsep teknologi yang dikembangkan.
- (5). Mentransfer teknologi perangkat keras maupun perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat

3.2. Kelompok Sasaran:

Masyarakat yang membutuhkan teknologi baik di pedesaan maupun di perkotaan.

3.3. Jenis Program, antara lain :

- a. Pengembangan teknologi energi angin, air, surya dan biomass.
- b. Kaji tindak pengembangan teknologi perangkat lunak dalam bentuk pengembangan metoda dan konsep di bidang kelembagaan sosial dan ekonomi pedesaan.
- c. Kaji tindak pengembangan teknologi perangkat keras dalam bentuk pengembangan dan penerapan teknologi untuk memecahkan permasalahan kebutuhan dasar di daerah pedesaan.
- d. Kaji tindak teknologi pendidikan non formal non klasikal bagi masyarakat pantai dan pedesaan
- e. Kaji tindak teknologi konservasi lahan pantai.
- f. Studi kelayakan penerapan teknologi pada industri menengah dan kecil.

4. Bidang Kuliah Kerja Nyata

4.1. Tujuan:

1. Menghasilkan calon sarjana sebagai penerus pembangunan, yang menghayati permasalahan yang kompleks yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan dan belajar menanggulangi permasalahan tersebut secara pragmatis dan interdisipliner.
2. Mendekatkan program tri darma dengan tuntutan pembangunan.
3. Mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, latihan kerja dan pengamatan teknis yang dilakukan di lapangan.
4. Membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan masyarakat.

4.2. Kelompok Sasaran:

Mahasiswa, masyarakat desa dan perkotaan, perencana dan pelaksana pembangunan tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, serta lembaga-lembaga lainnya yang terkait.

4.3. Jenis Program, antara lain:

- a. mengevaluasi dampak KKN terhadap mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah maupun perguruan tinggi dan memantapkan pedoman pelaksanaan KKN UNDIP terus menerus.
- b. meningkatkan kerja sama di dalam UNDIP dan luar UNDIP
- c. memantapkan mekanisme koordinasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata
- d. mengembangkan program dan pelaksanaan KKN melalui lokakarya dan evaluasi KKN
- e. memanfaatkan hasil laporan KKN bagi penyusunan program pengabdian pada masyarakat,
- f. merumuskan dan mengisi program tindak lanjut dari KKN dalam bentuk program-program pengabdian pada masyarakat lainnya.

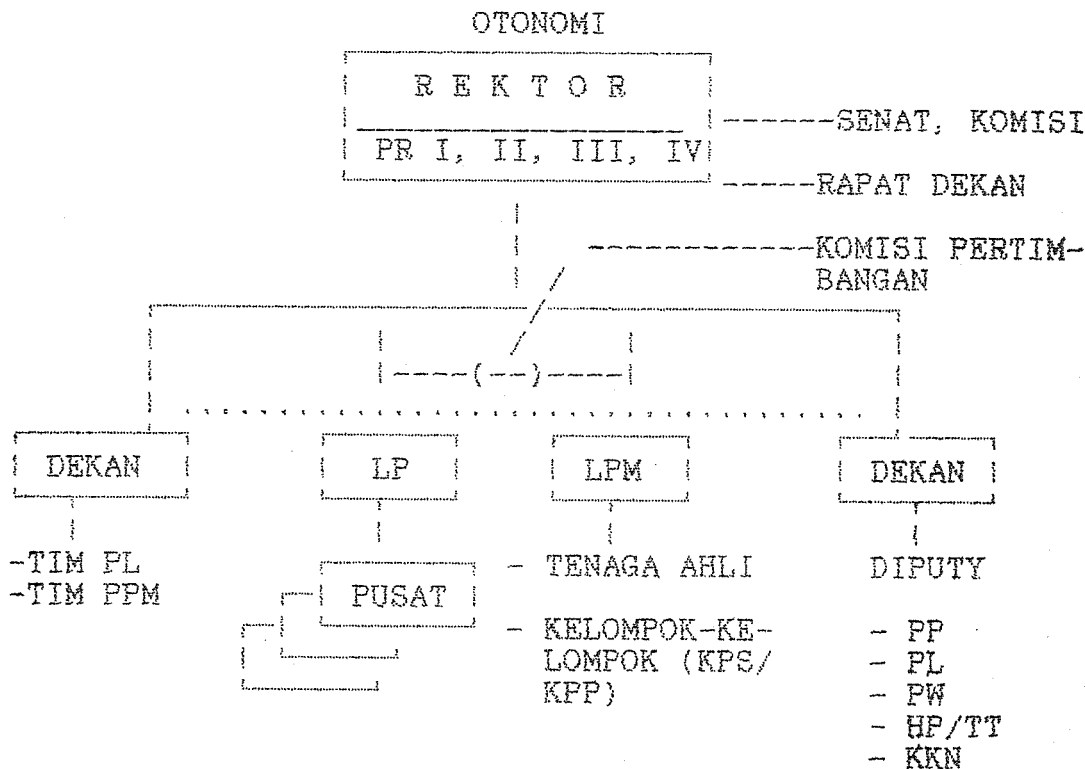
Uraian pokok-pokok rencana dasar dan program di atas kemudian dapat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk proyek dan kegiatan-kegiatan. Tiap proyek atau kegiatan akan dibuatkan rencana tindakan operasional dengan mempertimbangkan aspek akademis, teknis, sosial ekonomis, dan politis.

**PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DALAM MEMASUKI JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN TAHAP DUA¹⁾**

Oleh:
Prof. Dr. Wahyu Karhiwikarta²⁾

PENDAHULUAN

- * PROGRAM ERAT KAITANNYA DENGAN STRUKTUR & MEKANISME KERJA LPM.
- * POTENSI INTERN (PIP) RIP STATUTA & SITUASI EKSTERN (GBHN)
- * STRUKTUR ORGANISASI



- 1) Resume Makalah disampaikan pada Sarasehan Nasional Pengabdian kepada Masyarakat II Perguruan Tinggi se Indonesia, di IPB Bogor tanggal 2 Maret 1981
- 2) Ketua LPM Universitas Pajajaran Bandung

PPM DI UNPAD

- I.
 1. PUSAT (TOP DOWN)
 2. FAKULTAS (BOTTOM-UP)
 3. KERJASAMA

- II.
 1. PUSAT PENDIDIKAN
 2. PUSAT PELAYANAN
 3. PUSAT PENGEMB. WILAYAH
 4. PUSAT KKN
 5. SEKRETARIS

- III. PROGRAM PPM A REKTOR
 1. PENINGKATAN KUANTITAS
 2. PENINGKATAN KUALITAS
 3. PEMERATAAN (11 FAKULTAS)
 4. PENDAYAGUNAAN

- IV. PPM - ALOKASI DANA LPM -5 % (LP 15 %)
 1. PEMBINAAN TENAGA AKADEMIS
(PENATARAN METODA PPM DLL.)
 2. KERJASAMA (PENJAJAKAN)
 3. PELAKSANAAN PPM /KEGIATAN PPM
 4. PENGELOLAAN/KELEMBAGAAN
 5. KKN

- V. PPM PUSAT (KUALITAS)
 1. DILAKSANAKAN OLEH KPS/KPPP (KELOMPOK)
 2. MULTI FAKULTAS (MINIMAL 2 FAKULTAS) & SEKTORAL
 3. BERKESINAMBUNGAN
 4. MANFAAT GANDA
 5. MEMB. NILAI TAMBAH PADA MASYABAKAT
 6. KETERKAITAN LUAS
PT ; PENELITIAN ; KKN
 7. PEMERINTAH DAERAH

- VI. FAKULTAS
 - PR. FAK
 - KUM

VII. KERJASAMA - UNIT-UNIT (SWADAYA)

VIII. JENIS-JENIS PPM YANG PERLU DIKEMBANGKAN BERSAMA:
(KUALITAS HIDUP & INDUSTRIALISASI)

1. LKMD)
2. KUD) TETAP DILAKSANAKAN
3. PWT)
4. KEPARIWISATAAN
5. LING. HIDUP (POLUSI_)/L. KERING-TERLANTAR-TERBATAS
6. KESEMPATAN KERJA/PENGANGGURAN
7. SADAR HUKUM /DISIPLIN NASIONAL/PERPAJAKAN
8. PERAN GENERASI MUDA & WANITA
9. INDUSTRI KECIL/SEKTOR INFORMAL/FAKIR MISKIN
10. KESEHATAN/GIZI/KB/OR
11. PEBINAAN USIA LANJUT (MANULA)
12. MASYARAKAT TERASING
13. ETOS KEWIRASWASTAAN
14. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN TATA RUANG
15. TRANSMIGRASI